

**PENGARUH EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA BOS TERHADAP
KINERJA KEPALA SEKOLAH DI SMA SI EMPAT NEMPU
HILIR KABUPATEN DAIRI**

TESIS

OLEH

**HERRISON SAMOSIR
201801078**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUB
LIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

**PENGARUH EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA BOS TERHADAP
KINERJA KEPALA SEKOLAH DI SMA SI EMPAT NEMPU
HILIR KABUPATEN DAIRI**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**HERRISON SAMOSIR
201801078**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pengaruh efektifitas, efisiensi dan Transparansi penggunaan dana bos terhadap Kinerja kepala sekolah di sma siempat nempu Hilir kabupaten dairi

Nama : Herrison Samosir

NPM : 201801078

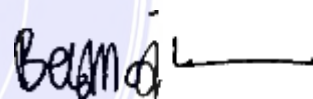
MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Pembimbing II



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Admimistrasi Publik**



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Direktur



Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada 25 Oktober 2024

Nama : Herrisson Samosir

NPM : 201801078



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Sekretaris : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP
Pembimbing I : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP
Penguji Tamu : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herrisson Samosir
NPM : 201801078
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Judul Tesis : Pengaruh efektifitas, efisiensi dan Transparansi penggunaan dana bos terhadap Kinerja kepala sekolah di sma siempat nempu Hilir kabupaten dairi

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis sebagai acuan kutipan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Oktober 2014
Yang Membuat
Pernyataan



Herrisson Samosir
NPM : 201801078

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Herrisson Samosir
NPM : 201801078
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh efektifitas, efisiensi dan Transparansi penggunaan dana bos terhadap Kinerja kepala sekolah di sma siempat nempu Hilir kabupaten dairi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan**



Herrisson Samosir

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“Pengaruh efektifitas, efisiensi dan Transparansi penggunaan dana bos terhadap Kinerja kepala sekolah di sma siempat nempu Hilir kabupaten dairi”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister pada program studi magister ilmu administrasi Publik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Sallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab dengan keterbatasan penulis adalah bentuk penulis hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, melalui penulisan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis

Medan, 2024



Herrison Samosir

ABSTRAK

PENGARUH EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PENGUNAAN DANA BOS TERHADAP KINERJA KEPALA SEKOLAH DI SMA SI EMPAT NEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI

Nama : Herrisson Samosir
NPM : 201801078
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Pembimbing II: Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas, efisiensi, dan transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap kinerja kepala sekolah di SMA Si Empat Numpu Hilir, Kabupaten Dairi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada kepala sekolah dan staf terkait di SMA tersebut. Analisis data dilakukan dengan teknik statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara efektivitas, efisiensi, dan transparansi penggunaan dana BOS terhadap kinerja kepala sekolah. Secara keseluruhan, penggunaan dana BOS yang efektif, efisien, dan transparan dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan dana BOS di sekolah untuk mendukung perbaikan kinerja kepala sekolah dan mutu pendidikan di SMA Si Empat Numpu Hilir.

Kata kunci: efektivitas, efisiensi, transparansi, dana BOS, kinerja kepala sekolah, SMA Si Empat Numpu Hilir.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF EFFECTIVENESS, EFFICIENCY AND TRANSPARENCY OF THE USE OF BOS FUNDS ON THE PERFORMANCE OF SCHOOL PRINCIPALS IN SI FOUR NEMPU HILIR SMA DAIRI DISTRICT

Name: Herrisson Samosir

NPM : 201801078

Study Program: Master of Public Administration

Advisor I : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Advisor II: Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

This study aims to analyze the effect of effectiveness, efficiency, and transparency of the use of School Operational Assistance (BOS) funds on the performance of school principals in Si Empat Numpu Hilir High School, Dairi Regency. The method used in this research is a quantitative approach with a correlational design. Data were collected through questionnaires distributed to principals and related staff at the high school. Data analysis was conducted using descriptive statistical techniques and multiple linear regression. The results showed that there was a significant positive influence between the effectiveness, efficiency, and transparency of the use of BOS funds on the performance of school principals. Overall, the effective, efficient, and transparent use of BOS funds can improve the performance of school principals in managing schools. This study suggests the need to improve the quality of BOS fund management in schools to support the improvement of principals' performance and the quality of education in SMA Si Empat Numpu Hilir.

Keywords: *effectiveness, efficiency, transparency, BOS funds, principals' performance, SMA Si Empat Numpu Hilir.*

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Hipotesis.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	18
1. Manajemen Dana Bantuan Sekolah (BOS)	18
2. DanvBOS.....	26
3. Efektivitas Penggunaan Dana BOS	40
4. Efektivitas Penggunaan Dana BOS	46
5. Transparansi Penggunaan Dana BOS.....	50
6. Kinerja Kepala Sekolah dalam Penggunaan Dana BOS.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	58
1. Tempat Penelitian.....	58
2. Waktu Penelitian	58
B. Bentuk Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sampel	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Defenisi Variabel dan Defenisi Operasional.....	60
F. Tekni Analisis Data	62
BAB IV :	

PEMBAHASAN A.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

DAFTAR PUSTAKA..... 69





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber dana pendidikan dasar yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan inisiatif nasional disektor pendidikan yang mengalokasikan sumber daya keuangan yang besar dan terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban keuangan keluarga terkait pendidikan, khususnya dalam mendukung kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Program BOS sangat penting untuk mempertahankan angka partisipasi sekolah, sebagaimana dibuktikan oleh indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), dan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar sambil menjawab kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaannya (Djalal dan Supriadi, 2001). Alokasi dana BOS di sekolah harus ditentukan melalui konsensus antara tim manajemen sekolah BOS, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, dan dana ini harus didokumentasikan sebagai bagian dari sumber pendapatan dalam RAPBS, di samping kontribusi dari Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah. Setiawan (2009) mengidentifikasi empat pertimbangan utama dalam pemanfaatan dana BOS: efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi berarti bahwa dana yang diterima sekolah digunakan secara optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Efektivitas dibangun atas gagasan efisiensi ini, yang menunjukkan sejauh mana dana mencapai hasil yang diinginkan.

yang mana keberhasilan tersebut diraih Hasil keputusan awal menunjukkan beberapa faktor kunci. Pertama, efektivitas dapat diartikan sebagai penilaian terhadap program yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, transparansi sangat penting; kurangnya transparansi dari pihak sekolah dapat menimbulkan protes dari orang tua. Transparansi ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyelewengan dana di lingkungan sekolah. Ketiga, akuntabilitas sangat penting, khususnya terkait dengan pencairan dana BOS, yang harus mematuhi kewajiban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika keempat aspek ini diperhatikan dengan baik, penyaluran bantuan BOS akan tepat sasaran, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu dan miskin. Namun, meskipun Program BOS telah dimulai pada bulan Juli 2005, lima tahun telah berlalu tanpa memenuhi harapan masyarakat akan pendidikan dasar gratis sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar dan terus meningkat, namun penyebaran informasi mengenai dana BOS belum memadai. Kasus penyelewengan dana BOS telah dilaporkan di berbagai daerah di Indonesia, yang sering kali bersumber dari kurangnya kesadaran orang tua tentang program tersebut. Kesenjangan informasi ini dimanfaatkan oleh sekolah, yang dapat mengenakan biaya kepada siswa yang seharusnya ditanggung oleh dana BOS. Lebih jauh, perencanaan penggunaan dana BOS yang diajukan oleh sekolah sering kali tidak melibatkan orang tua dan tidak dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Akibatnya, banyak orang tua yang tidak mengetahui tentang BOS dan penerapannya. Baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, pungutan tambahan terus terjadi, meskipun ada harapan bahwa peningkatan dana akan mengurangi biaya keseluruhan..

Lembaga pendidikan murah. (Wiguna, 2008) Tantangan lain yang sering dihadapi baik di lingkungan pendidikan swasta maupun negeri adalah terus berlanjutnya pemberlakuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, inflasi dalam APBS, dan proses belajar mengajar yang tidak efektif akibat salah urus dana BOS. Kurangnya transparansi kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS, ditambah dengan terbatasnya pemahaman orang tua tentang dana tersebut, memperburuk keadaan. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan tata kelola sekolah yang buruk, proses pendidikan yang tidak optimal, dan penurunan kualitas pendidikan yang terus-menerus. Jumlah dana yang signifikan yang tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan dapat memicu ketidakpuasan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sejak dimulainya program BOS pada tahun 2005, kasus-kasus pemerasan dan penyimpangan terus muncul. Hal ini telah mendorong simbiosis yang merugikan antara sekolah dan otoritas pendidikan mengenai pemotongan dana BOS untuk memfasilitasi kelancaran penyaluran sumber daya keuangan. Oleh karena itu, keterlibatan, kepedulian, dan keterlibatan proaktif para pemangku kepentingan pendidikan sangat penting dalam pengawasan BOS. Menurut laporan ICW tentang dugaan korupsi dalam anggaran pendidikan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 142 kasus korupsi dalam anggaran pendidikan yang dilaporkan sejak tahun 2004 hingga 2009, yang mengakibatkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 243 miliar (Suara Pembaruan, September 2009). Berbagai temuan kasus dan isu yang disorot diatas menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah belum secara efektif sejalan dengan tujuan dan sarannya, juga tidak mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan hal mendasar untuk mencapai integritas pendidikan. tata kelola pemerintahan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Bank Manajemen Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdiri dari

Document Accepted 8/1/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 kata manajemen keuangan dan dana BOS. Manajemen dapat didefinisikan dari

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

berbagai perspektif. Banyak ahli teori manajemen dalam buku dan artikel tentang manajemen praktis dan penelitian empiris mendefinisikannya secara berbeda. Boris Kaehler dan Jens Grundeis dalam bukunya yang berjudul *HR Governance; A Theoretical Introduction*, mengutip beberapa pendapat ahli tentang definisi manajemen. Fayol (1916:5), manajemen berarti meramalkan dan merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, mengoordinasikan, dan mengendalikan. Koontz (1961:186), manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang-orang dan kelompok yang terorganisasi secara formal; seni menciptakan lingkungan dalam kelompok yang terorganisasi di mana orang-orang dapat tampil sebagai individu tetapi bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok; seni menghilangkan hambatan, seni mengoptimalkan efisiensi dalam mencapai tujuan secara efektif..

Bovee et al. (1993:5), Manajemen dapat dikarakterisasikan sebagai pendekatan sistematis untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian penggunaan sumber daya manusia, fisik, keuangan, dan informasi yang efektif dan efisien. Menurut Schermerhorn (2005:19), manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk memenuhi target kinerja. Dalam analisis mereka, Boris Kaehler dan Jens Grundeis menegaskan bahwa manajemen melibatkan peramalan dan perencanaan untuk mengatur, memerintahkan, mengoordinasikan, dan mengawasi pencapaian tujuan organisasi (Kaehler dan Grundeis, 2019:11). Lebih lanjut, Istijarti et al. (2019:905) dan Dufour et al. (2020:4) menggambarkan manajemen sebagai ilmu dan seni yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sondang P. Siagian mendefinisikan manajemen sebagai keterampilan atau kemampuan untuk mencapai hasil dalam mengejar tujuan yang ditetapkan (Siagian Sondang, 2015:6). Oleh karena

Keuangan mencakup studi tentang bisnis individual, pengembangan organisasi, alokasi dan pemanfaatan sumber daya moneter dari waktu ke waktu, dan penilaian risiko yang terkait dengan pelaksanaan proyek (Fitriani, 2014:33). Keuangan secara intrinsik terkait dengan pelaporan keuangan, yang melibatkan seni perhitungan, pengelolaan, dan dokumentasi laporan yang berfungsi sebagai alat penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, aktivitas organisasi, upaya investasi, dan operasi pendanaan. Laporan keuangan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: laporan yang ditujukan untuk manajemen, laporan untuk pemangku kepentingan eksternal, dan laporan untuk pihak tertentu. Ketiga kategori laporan keuangan tersebut berasal dari proses akuntansi yang sama, yang merupakan produk dari sistem informasi akuntansi (Riswan dan Kusuma, 2014:94). Laporan-laporan ini merangkum proses pencatatan, merangkum transaksi keuangan yang terjadi selama tahun fiskal yang relevan (Baridwan, 2004:17). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan laporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, paragraf 07, sebagai komponen integral dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan komprehensif biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan materi penjelasan lain yang penting bagi laporan keuangan (IAI, 2018). Laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting, karena diharapkan dapat memberikan wawasan tentang arus masuk dan arus keluar keuangan perusahaan (Rabuisa et al., 2018:325). Keuangan merupakan bagian dari manajemen, yang berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, untuk memastikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Mengingat hubungan yang erat antara keuangan sekolah dan pencapaian tujuan pendidikan, keuangan memegang peranan penting dalam sektor pendidikan (Fitri, 2014; 33; Said, 2018: 2). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting untuk mendukung proses pendidikan.

dan Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (Puspitasari dan Sukur, 2020: 95). Untuk mendukung sekolah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku, pengelolaan keuangan sekolah meliputi perencanaan, pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Fitri, 2014: 33). Pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting untuk menjamin terselenggaranya pendapatan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan dengan cermat, sistematis, dan bertanggung jawab agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Fitri, 2014: 34). Pengelolaan keuangan yang baik merupakan prasyarat mutlak bagi lembaga pendidikan untuk mencapai tujuannya. Pentingnya pengelolaan keuangan pendidikan yang efektif terletak pada kemampuannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan mendorong terwujudnya lembaga pendidikan yang efisien melalui pengelolaan keuangan yang bijaksana (Puspitasari dan Sukur, 2020: 95). Tujuan pendanaan pendidikan adalah untuk menghimpun sumber daya dari berbagai sumber guna mendukung kemajuan dan kelancaran kegiatan pendidikan (Nadira, 2016: 14). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2003, sumber dana pendidikan bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumbangan masyarakat. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan rutin sebagaimana tercantum dalam Daftar Kegiatan (DIK) dan untuk kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Daftar Proyek (DIP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).) Pemerintah pusat mengawasi pengelolaan dana pendidikan. Sebaliknya, pemerintah daerah memperoleh sumber keuangannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten atau kota. APBD memberikan dukungan keuangan untuk inisiatif pendidikan daerah yang relevan, yang dapat mencakup proyek rutin dan upaya pembangunan. Kontribusi masyarakat terhadap biaya pendidikan biasanya

UNIVERSITAS MEDAN AREA bentuk sumbangan barang, peralatan, dan jasa yang tidak mengikat.

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012, yang membahas Retribusi dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, Pasal 5 menyebutkan bahwa sumber dana pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau wali peserta didik, sumbangan dari pemangku kepentingan dalam pendidikan dasar di luar peserta didik atau wali peserta didik, bantuan tidak mengikat dari lembaga lain, dukungan tidak mengikat dari badan asing, dan sumber lain yang sah. Pasal 6 menyebutkan berbagai sumber pendanaan bagi lembaga pendidikan dasar yang dikelola oleh masyarakat. Biaya pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berbeda berdasarkan asal-usulnya, sebagaimana diuraikan oleh Harsono (2008: 9). Kategori-kategori ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, biaya yang ditanggung oleh orang tua atau wali siswa, sumbangan dari anggota masyarakat yang bukan orang tua atau wali, dan biaya yang terkait dengan lembaga pendidikan itu sendiri. Sekolah memperoleh dana dari pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) melalui proposal yang diajukan oleh lembaga. Sumbangan orang tua berasal dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya insidental, sementara dukungan masyarakat dari anggota non-orang tua biasanya berbentuk sumbangan sukarela yang ditujukan untuk meningkatkan pengembangan sekolah.

. Lembaga pendidikan juga memperoleh pendapatan melalui unit produksi yang dimilikinya. Ferdi (2013: 566) menyatakan bahwa sumber dana pendidikan mencakup semua entitas yang memberikan subsidi dan sumbangan secara berkala kepada sekolah, baik dari lembaga resmi maupun sumbangan masyarakat. Amirin (2013: 92) mengategorikan sumber dana tersebut ke dalam lima kelompok, yaitu: a) anggaran rutin dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), b) dana penunjang (SPP), c) bantuan dari Badan Penyelenggara Pendidikan (BP3), d)

sumbangan dari pemerintah daerah (jika ada), dan e) bantuan lainnya. Salah satu sumber dana yang cukup besar dari pemerintah pusat adalah

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut dana BOS. Inisiatif ini bertujuan untuk membiayai biaya operasional nonpersonaliasatuan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2018. Fitri Afrilliana (2021: 33) mengartikan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai mekanisme dukungan dana untuk biaya operasional nonpersonalia pada pendidikan dasar, sehingga memudahkan pelaksanaan program wajib belajar melalui pendanaan tunai. Dana BOS merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan dana langsung kepada lembaga pendidikan negeri dan swasta. Alokasi dana untuk setiap sekolah didasarkan pada tingkat partisipasi siswa dan biaya satuan bantuan (Sapitri, 2020: 3). Menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2021 yang merinci Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pasal 1 ayat 1, dana tersebut terutama diperuntukkan bagi belanja nonpersonalia pada lembaga pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan program wajib belajar. Selain itu, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Dana BOS Reguler dirancang untuk membantu biaya operasional seluruh siswa yang terdaftar di lembaga pendidikan dasar dan menengah (Permendikbud, 2021). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan dukungan dana kepada sekolah melalui penyampaian Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Tujuan utama program BOS adalah untuk meringankan beban keuangan keluarga terkait biaya pendidikan, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan memfasilitasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sekolah yang belum mencapai tolok ukur tersebut, serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah yang telah mencapainya. Tujuan khusus bantuan BOS meliputi: 1) Mengalokasikan

penyampaian Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Sekolah dituntut untuk mengelola dana BOS secara efisien dan bertanggung jawab guna meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar. Dana yang dialokasikan pemerintah tersebut dikelola secara mandiri oleh sekolah dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Julantika, 2017:31). Fattah dan Rangono telah menyoroti bahwa dana yang diterima dari pemerintah atau sumber lain memerlukan manajemen yang cakap untuk memastikan kepatuhan hukum (Nanang Fatah, 2009:57; Rangongo et al., 2016:3). Manajemen yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, dengan Husaini menegaskan bahwa manajemen menyumbang 80% keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut (Husaini Usman, 2014:14).). Manajemen yang buruk dapat berdampak buruk pada kinerja sekolah, terlepas dari sumber daya keuangan yang dimiliki. Oleh karena itu, manajemen keuangan sekolah harus mematuhi prinsip-prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Praktik manajemen keuangan harus dilakukan secara bertanggung jawab terkait penerimaan dan pengeluaran dana, dengan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum. Transparansi dalam pengelolaan dana berarti bahwa pemangku kepentingan terkait memiliki akses terhadap informasi ini. Lembaga telah menerapkan peraturan yang membatasi peran administrasi keuangan kepada individu tertentu yang memiliki pelatihan yang diperlukan untuk memahami dan mengelola proses ini (Harsono, 2008: 89). Manajemen keuangan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan, dan akuntabilitas, yang semuanya bertujuan untuk memastikan administrasi keuangan yang tertib dan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan (Nadira, 2016: 12). Lebih lanjut, Nadira menyoroti pentingnya manajemen keuangan yang efektif untuk keseluruhan administrasi sekolah dan madrasah, khususnya dalam tanggung jawab mereka untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Manajemen Keuangan Pendidikan melalui alokasi BOS. Tujuan pengelolaan keuangan**

Document Accepted 8/1/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

sekolah sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak, mengutip atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BOS Reguler Tahun 2021 antara lain: a) Terwujudnya pemanfaatan dana

Accepted by: 8/1/25

sekolah/madrasah yang transparan dan akuntabel, b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, c) Mendorong pemanfaatan dana sekolah secara ekonomis, d) Mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, e) Mendorong inovasi dalam pengalokasian sumber dana sekolah, dan f) Terwujudnya kompetensi akuntabilitas keuangan sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Fauziyyah dkk. (2018:23) mengidentifikasi tujuan pengelolaan dana BOS sebagai berikut: a) Terwujudnya pemanfaatan dana sekolah/madrasah yang transparan dan akuntabel, b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, c) Mendorong pemanfaatan dana sekolah secara ekonomis, d) Mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, e) Mendorong inovasi dalam pengalokasian dana sekolah.

), Manajemen keuangan mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan, dan memastikan akuntabilitas alokasi dana sesuai tujuan yang dimaksudkan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk membangun administrasi keuangan sistematis yang mendorong akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang relevan. Ia beroperasi di bawah prinsip-prinsip tertentu, seperti pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pemberi otorisasi, penerbit perintah, dan bendahara (Pusvitasari dan Sukur, 2020:96). Berdasarkan perspektif Rohiat dan Pusvitasari, Harsono menyoroti bahwa manajemen keuangan sekolah yang efektif harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi. Akuntabilitas dalam konteks ini memerlukan kepatuhan terhadap persyaratan hukum mengenai penerimaan dan pencairan dana, sementara transparansi memastikan bahwa praktik pengelolaan dana terbuka untuk pengawasan oleh pemangku kepentingan terkait (Harsono, 2008:89). Pengelolaan dana BOS Reguler sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021 berpedoman pada beberapa prinsip utama, yaitu: a)

UNIVERSITAS MEDAN AREA yaitu memungkinkan pengalokasian Dana BOS Reguler berdasarkan

tujuan yang ditetapkan.

Lembaga pendidikan harus mengutamakan beberapa prinsip utama, yaitu: c) efisiensi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dengan meminimalkan biaya untuk mencapai hasil yang optimal; d) akuntabilitas, yang menjamin bahwa pemanfaatan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e) transparansi, yang mengharuskan pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan berdasarkan kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, bendahara yang ditunjuk harus memiliki keterampilan dalam pembukuan dan akuntabilitas keuangan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sudut pandang manajemen keuangan, administrator sekolah bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, dan melaporkan pengelolaan dana yang efektif dengan cara yang tepat dan transparan. Pengelolaan dana yang efektif secara intrinsik terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas baik dalam pengelolaan maupun pengawasan. Faktor penting yang memengaruhi efektivitas tim pengelola program BOS adalah pengelolaan dana dan sumber daya yang cakap dalam program BOS. Pengelolaan dana BOS yang efektif sangat penting karena memegang peranan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan program BOS. Keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS bergantung pada pendekatan kolaboratif yang sistematis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Pusvitasari dan Sukur 2020:5). Secara umum, tata cara pengelolaan dan pelaporan dana BOS reguler oleh sekolah sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler tahun 2021, meliputi: a) memastikan data sekolah terinput dan ter-update secara akurat dan lengkap dalam Dapodik sehingga

UNIVERSITAS MEDAN AREA kondisi sekolah yang sebenarnya, dan b) menyusun RKAS dan menginputkannya ke dalam sistem yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan., c)

akuntabilitas atas pemanfaatan dana BOS secara berkala, dan tetap dapat diakses untuk audit yang dilakukan oleh entitas yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin keakuratan laporan keuangan, lembaga pendidikan diamanatkan untuk menerapkan praktik pembukuan yang komprehensif, yang harus dibuktikan dengan dokumentasi yang sesuai. Pembukuan yang dikelola oleh sekolah minimal harus mencakup RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diperlukan.

Hasil investigasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Dairi mengungkapkan bahwa penerapan dana BOS di sekolah belum mencapai standar efektivitas, efisiensi, dan transparansi yang diharapkan. Hal ini tercermin dari kurangnya ketersediaan informasi publik mengenai alokasi dana BOS oleh sekolah menengah atas di wilayah tersebut. Akibatnya, kurangnya transparansi ini menyebabkan beragamnya persepsi di antara orang tua, masyarakat, dan media tentang transparansi, efektivitas, dan efisiensi dana BOS yang diperuntukkan bagi sekolah. Menurut pedoman yang ditetapkan, transparansi sangat penting untuk pengelolaan dana tersebut dengan tepat.

Skenario ini mendorong peneliti untuk menyelidiki faktor-faktor yang menghambat penggunaan dana BOS secara efektif. Keadaan yang diamati di sekolah-sekolah tersebut bertentangan dengan pernyataan Fauziyyah dkk. (2018:23) dan Batlajery (2019:30), yang menganjurkan pengelolaan dana sekolah dan madrasah yang transparan dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan keuangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA mengungkapkan bahwa pemangku kepentingan terkait harus memiliki akses terhadap

Document Accepted 8/1/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

informasi: Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dana BOS di sekolah

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menengah atas di Kabupaten Dairi telah menyebabkan rendahnya keterlibatan

id)8/1/25

masyarakat, karena para pemangku kepentingan tidak memiliki akses terhadap informasi anggaran yang diperlukan untuk pengawasan yang efektif. Terlihat jelas bahwa fungsi pengawasan sangat tidak memadai, yang mengakibatkan kurangnya partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Keterbukaan informasi publik merupakan indikator penting dari pelaksanaan dana BOS yang efektif..

Akuntabilitas merupakan faktor penting yang secara intrinsik terkait dengan efektivitas keterlibatan masyarakat, khususnya yang menyangkut komite sekolah dan orang tua (Pusvitasari dan Sukur, 2020:95). Akuntabilitas menjadi landasan pengelolaan dana BOS yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat, termasuk komite sekolah dan orang tua. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS berkaitan dengan hak masyarakat (orang tua) untuk memperoleh laporan yang jelas tentang pelaksanaan program dana BOS. Lebih jauh, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan sekolah berdampak buruk pada kinerja Kepala Sekolah. Dalam konteks ini, Kepala Sekolah mungkin ragu untuk memotivasi orang tua untuk berkolaborasi dalam inisiatif pengembangan sekolah atau untuk membuat program yang relevan terkait dengan pendanaan. Berapa pun besarnya sumber daya keuangan yang tersedia bagi sekolah, pengelolaan keuangan haruslah mematuhi prinsip-prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi (Harsono, 2008:89; Fauziyyah et al., 2018:23; Erlinawati dan Badrus, 2018:416; Pusvitasari dan Sukur, 2020:96).

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, pengamatan empiris, dan teori-teori terkait, peneliti terdorong untuk meneliti pengelolaan dana BOS dengan judul penelitian yang diusulkan.: **Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Transparansi Penggunaan Dana BOS Terhadap Kinerja Kepala Sekolah di SMA Si Empa**

Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut, dengan mempertimbangkan konteks dan fokus yang diuraikan sebelumnya:

- a. Bagaimana dampak efektivitas pemanfaatan Dana BOS terhadap kinerja Kepala Sekolah SMA Si Empat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi?
- b. Bagaimana dampak efisiensi pemanfaatan Dana BOS terhadap kinerja Kepala Sekolah SMA Si Empat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi?
- c. Bagaimana dampak transparansi pemanfaatan Dana BOS terhadap kinerja Kepala Sekolah SMA Si Empat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi?
- d. Bagaimana dampak efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemanfaatan Dana BOS terhadap kinerja Kepala Sekolah SMA Si Empat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menilai dampak efektivitas pemanfaatan Dana BOS terhadap kinerja Kepala Sekolah SMA Si Empat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi.
- b. Untuk menilai dampak efisiensi pemanfaatan Dana BOS terhadap kinerja Kepala Sekolah SMA Si Empat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.
- c. Untuk mengevaluasi dampak transparansi pemanfaatan Dana BOS terhadap kinerja Kepala Sekolah SMA Si Empat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.
- d. Untuk mengevaluasi dampak gabungan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemanfaatan Dana BOS terhadap kinerja Kepala Sekolah SMA Si Empat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.? .

- 1) Bagi Kepala Sekolah: Penelitian ini dapat menjadi sumber daya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan mendorong akuntabilitas dalam alokasi dan penggunaan dana BOS di lembaga masing-masing.
- 2) Bagi Dinas Pendidikan: Wawasan yang diperoleh dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan melalui pengelolaan keuangan dana BOS yang efektif.
- 3) Bagi Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota: Informasi yang diberikan dapat membantu dalam memperoleh akuntabilitas yang lebih efektif dan efisien terkait penggunaan dana BOS.
- 4) Bagi Badan Keuangan dan Anggaran Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Masyarakat Umum: Penelitian ini akan memberikan informasi berharga tentang akuntabilitas dana BOS dan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal atas pemanfaatan dana.
- 5) Bagi Peneliti Lain: Penelitian ini akan memberikan bahan referensi yang relevan untuk penelitian selanjutnya..

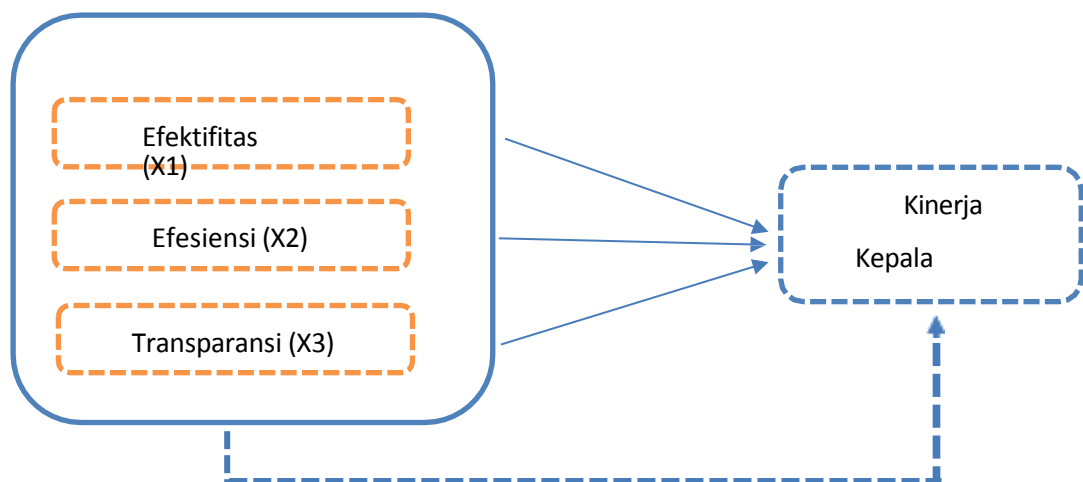
1.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian lapangan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana BOS di SMA Negeri

1 Si Empat Nempu Hilir mengungkapkan hal-hal berikut: 1) Efektivitas kinerja Kepala Sekolah dalam menunjukkan prestasi sekolah sangat bergantung pada kolaborasi dan keterlibatan warga sekolah. Sangat penting untuk menjaga transparansi dalam berbagai hal, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapat informasi tentang status dan kemajuan sekolah sebagaimana mestinya. 2) Dukungan pemerintah dalam bentuk dana BOS harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara akurat, dengan informasi yang relevan dapat diakses oleh warga sekolah untuk menumbuhkan persepsi positif di antara para anggotanya. 3) Sistem pelaporan dana BOS saat ini tidak memenuhi standar transparansi yang diharapkan, dan implementasinya kurang efektif dan efisien, yang berdampak buruk pada kemampuan Kepala Sekolah untuk menginspirasi kreativitas dalam program sekolah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Akibatnya, pelaporan pemanfaatan dana BOS tidak hanya penting bagi Dinas Pendidikan tetapi juga penting bagi warga sekolah, karena mendorong persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana BOS sekolah..

untuk memberikan dukungan dana untuk biaya operasional nonpersonalia di lingkungan lembaga pendidikan dasar, memfasilitasi pelaksanaan inisiatif pendidikan wajib melalui pendanaan tunai. Sekolah harus mengelola dana BOS secara profesional dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar mengajar. Berapa pun jumlah dana yang tersedia, pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan penurunan kinerja sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah yang efektif harus mematuhi prinsip-prinsip tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan dana, pemeliharaan catatan data yang akurat, pelaporan, dan memastikan akuntabilitas dalam administrasi keuangan sekolah, yang semuanya bertujuan untuk menunjukkan tata kelola keuangan yang tertib sesuai dengan peraturan yang relevan. Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2021, tujuan pengelolaan keuangan sekolah antara lain: a) Memastikan penggunaan dana sekolah/madrasah secara transparan dan akuntabel, b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana, c) Mendorong penggunaan sumber daya sekolah secara ekonomis, d) Mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, dan e) Mendorong pendekatan inovatif dalam mencari sumber dana sekolah..

Kerangka berfikir dalam penelitian ini, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Paradigma Peneliti

1.5. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Efektivitas pemanfaatan dana BOS berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah SMA Negeri 1 Si Empat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.

2. Efisiensi pemanfaatan dana BOS berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah SMA Negeri 1 Si Empat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.

3. Transparansi pemanfaatan dana BOS berpengaruh terhadap kinerja kepala sekolah SMA Negeri 1 Si Empat Nempu Hilir Kabupaten Dairi.

4. Efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemanfaatan dana BOS secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja kepala sekolah SMA Negeri 1 Si Empat Nempu Hilir Kabupaten Dairi..

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pemerintah biasanya mengalokasikan dana BOS untuk menjamin bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Pemerintah memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan dan menawarkan pengecualian atau pengurangan biaya pendidikan. Dana yang diterima setiap sekolah ditentukan oleh jumlah siswa yang terdaftar dan alokasi unit dana BOS. Dana ini didistribusikan ke sekolah berdasarkan semester, dan kepatuhan terhadap pedoman teknis BOS sangat penting untuk pengelolaan dana ini (Sari, 2021). Sekolah diharapkan dapat mengelola dana BOS secara profesional dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar yang efektif. Dana BOS yang disediakan pemerintah dikelola secara mandiri oleh sekolah melalui sistem yang dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Administrator sekolah menegaskan bahwa MBS memungkinkan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan keuangan, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Pengelolaan keuangan yang efektif sejalan dengan prinsip-prinsip seperti penghematan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas dalam pengawasan (Hidayat, 2022). Namun, muncul tantangan terkait ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Isu-isu tersebut meliputi

kesenjangan dalam kompensasi guru dan staf. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat berasal dari akses yang tidak memadai terhadap informasi anggaran, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengawasi proses tersebut. Akibatnya, jelas bahwa fungsi pengawasan internal sangat kurang (Maharti, 2021). Tantangan terus muncul terkait dengan pengelolaan dana BOS yang tidak efektif.. Alokasi dana tidak ditentukan oleh kebutuhan khusus sekolah, melainkan oleh ketersediaan anggaran pelaksanaan, sehingga menyebabkan pengeluaran keuangan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kompensasi untuk guru dan staf tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan untuk bekerja. Faktor lain yang menyebabkan adalah kurangnya keterlibatan masyarakat, yang bersumber dari kurangnya akses informasi mengenai anggaran, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengawasi masalah keuangan secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam fungsi pengawasan (Maharti, 2021). Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamacinna merupakan salah satu lembaga yang memperoleh manfaat dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamacinna, diketahui bahwa, menurut Kepala Sekolah Sunarti, S.Pd.I, "Dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah diperoleh melalui dua tahap." Selanjutnya, alokasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan, ditetapkan sebesar 20% dari total Dana Bantuan Operasional Sekolah. Boris Kaehler dan Jens Grundei menegaskan bahwa manajemen melibatkan peramalan dan perencanaan, serta pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian tujuan suatu organisasi (Kaehler dan Grunde, 2019:11).

).

UNIVERSITAS MEDAN AREA tidak ada definisi tunggal yang disetujui secara luas tentang

Document Accepted 8/1/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

manajemen, maka sangat sulit untuk mendefinisikannya (Dalimunthe, 2003:2).

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

Namun, kata "manajemen" sendiri berasal dari kata kerja "mengelola" yang berarti memerintah. Manajemen merupakan prosedur untuk mencapai tujuan yang diinginkan karena pengaturan dilakukan melalui suatu proses dan didasarkan pada urutan fungsi manajemen (Husaini, dkk., 2019:44). Menurut Sridevi, manajemen merupakan sintesis dari ranah kreatif dan ilmiah. Manajemen merupakan bidang hibrida yang menggabungkan unsur sains dan seni. Sains merupakan sesuatu yang harus dipelajari, sedangkan seni merupakan sesuatu yang harus diterapkan. Sains harus diajarkan, dan seni harus dilakukan (Sridevi, 2020:1). Manajemen, menurut Robbins dan Coulter (2012:36), merupakan proses pengorganisasian dan pengintegrasian tugas-tugas pekerjaan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dengan sukses dan kolaboratif dengan orang lain. Griffin (2011:7) berpendapat bahwa manajemen adalah serangkaian tindakan (seperti pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan pembuatan rencana serta keputusan) yang ditujukan pada sumber daya organisasi (informasi, orang, uang, dan aset fisik) untuk mencapai tujuan organisasi secara sukses dan efisien..

Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang memungkinkan suatu organisasi menggunakan semua sumber dayanya untuk mencapai tujuannya. Kristiawan dkk. (2017:3) mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni untuk melakukan tugas-tugas tersebut.

baik secara berhasil maupun efisien. Sementara itu, G.R. Terry (2010:16) menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses khusus yang terdiri dari pengorganisasian, motivasi, perencanaan, dan pengaturan tindakan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya, termasuk

Menurut sudut pandang tersebut di atas, manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan secara berhasil dan efisien dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kayo (2014:32) bahwa organisasi harus melakukan tugas-tugas manajerial untuk mencapai tujuannya. George R. Terry mencantumkan hal-hal berikut sebagai rangkaian minimum fungsi manajerial: pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan perencanaan (juga dikenal sebagai POAC) (Terry, 2011:3). Baik bisnis atau kegiatan berskala kecil maupun besar, fungsi manajerial yang dimaksud sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keberhasilannya. Manajemen pada gilirannya dapat membantu memecahkan berbagai masalah secara kreatif, efektif, dan efisien. Fungsi manajerial yang tercantum di bawah ini digunakan untuk memecahkan masalah ini (Amtu, 2011:4–7):

1. Perencanaan merupakan proses mendasar yang melibatkan pemilihan tujuan dan penentuan sejauh mana tujuan tersebut dapat dicapai. Perencanaan berfungsi sebagai fungsi integratif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang kohesif, yang selaras dengan tujuan yang diinginkan (Hamdi, 2020:157). Esensi perencanaan terletak pada penggambaran urutan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu (Mustari, 2014:7). Proses perencanaan mencakup berbagai faktor yang melingkupinya. Perencanaan yang efektif harus mempertimbangkan elemen internal dan eksternal, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi, untuk memastikan keberhasilan realisasi tujuannya. Karena setiap tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut harus selaras dengan kebijakan, program kerja, prosedur, dan anggaran organisasi, manajemen harus memasukkan

komponen-komponen ini ke dalam fase perencanaan.

2. Pengorganisasian mengacu pada proses mengalokasikan pekerjaan dan tanggung jawab sambil mengoordinasikan upaya untuk memenuhi tujuan organisasi (Hamdi, 2020:157). Pengorganisasian merupakan fungsi manajerial yang mencakup pembagian tugas dan pengaturan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan tugas tersebut (Rahmad, 2016:66).

Prinsip utama pengorganisasian adalah pembagian tugas ke dalam berbagai komponen dalam organisasi..

- a. a. Actuating (atau Implementasi). Actuating merupakan fungsi manajerial yang bekerja secara langsung untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, actuating selalu berkaitan dengan pengorganisasian orang dan memotivasi mereka untuk melakukan tindakan yang diinginkan organisasi. (Hamdi, 2020:157). Fungsi manajemen yang ketiga adalah implementasi. Mirip dengan perencanaan, implementasi mencakup berbagai fungsi manajerial, termasuk penempatan staf, penganggaran, kepemimpinan, pengorganisasian, orientasi, koordinasi, inspirasi, dan pengendalian. (Ilaihi, Munir dan Wahyu, 2015: 159)
- b. b. Melakukan pengendalian. Salah satu fungsi manajemen adalah pengendalian (supervisi), yang berupa melakukan penilaian dan sekaligus melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa bawahan bekerja ke arah yang benar dan mencapai tujuan awal (Hamdi, 2020:157). Fungsi pengendalian dalam manajemen lebih umum disebut dengan istilah pengendalian atau supervisi. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan perbaikan guna perbaikan lebih lanjut merupakan proses pengawasan (Wibowo, 2013:61).

UNIVERSITAS MEDAN AREA Dalam dunia pendidikan, pengelolaan keuangan merupakan unsur yang

pencapaian tujuan pendidikan (Fitri, 2014:33; Said, 2018:2). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan selaras dengan tujuan yang diharapkan. Pengelolaan keuangan pendidikan menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam meningkatkan program sekolah, memfasilitasi peran guru dalam proses belajar mengajar, dan mendukung upaya akademis siswa (Puspitasari dan Sukur, 2020:95). Pengelolaan keuangan mencakup kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, alokasi sumber daya, dokumentasi data, pelaporan, dan akuntabilitas, yang semuanya bertujuan untuk membangun administrasi keuangan yang terorganisasi di dalam sekolah, sehingga memastikan bahwa praktik pengelolaan mematuhi peraturan yang relevan (Fitri, 2014:33).

Pengelolaan keuangan pendidikan harus didekati dengan keseriusan, perencanaan yang sistematis, dan rasa tanggung jawab untuk mengurangi potensi masalah, karena pengelolaan keuangan yang efektif dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi lembaga pendidikan (Fitri, 2014:34). Lembaga pendidikan yang berfungsi dengan baik ditandai dengan pengelolaan keuangan yang baik, yang sangat penting untuk mencapai target yang ditetapkan bersama. Untuk mendorong lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien melalui pengelolaan keuangan, praktik keuangan pendidikan yang baik harus memainkan peran penting dalam memenuhi aspirasi pendidikan (Puspitasari dan Sukur, 2020:95).

Manajemen keuangan merupakan aspek mendasar dari administrasi sekolah, yang secara signifikan memengaruhi pelaksanaan kegiatan pendidikan di dalam lembaga. Mirip dengan lingkup manajemen pendidikan yang lebih luas, manajemen keuangan mencakup serangkaian kegiatan termasuk perencanaan, pengorganisasian,

Dalam konteks yang sempit, manajemen keuangan mengacu pada pembukuan, sedangkan dalam konteks yang lebih luas, berkaitan dengan pengelolaan dan akuntabilitas sumber daya keuangan di tingkat pemerintah pusat dan daerah (Maisyarah, 2017:22). Lebih lanjut Maisyarah menjelaskan bahwa manajemen keuangan melibatkan orkestrasi kegiatan keuangan dengan memanfaatkan upaya orang lain. Proses ini mencakup tahapan dari perencanaan dan pengorganisasian hingga implementasi dan pengawasan. Dalam konteks manajemen keuangan sekolah, dimulai dengan perencanaan anggaran dan meluas hingga pengawasan dan akuntabilitas keuangan (Sulitroyani, 2019:2).

Manajemen keuangan terdiri dari tiga komponen utama: perencanaan keuangan, implementasi, dan evaluasi. Menurut Jones, perencanaan keuangan, yang sering disebut sebagai penganggaran, adalah proses mengoordinasikan secara sistematis semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan sambil meminimalkan dampak negatif (Ulbert, 2002:4). Implementasi melibatkan pelaksanaan anggaran, yang didasarkan pada rencana yang ditetapkan dan mungkin memerlukan penyesuaian seperlunya (Amin dan Anwar, 2016:233). Evaluasi adalah proses menilai sejauh mana tujuan telah tercapai (Sartono, 2001:6). Manajemen yang efektif berpegang teguh pada konsep yang ditetapkan dan selaras dengan objek dan konteks organisasi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan dengan jelas konsep yang berlaku dan objek yang ditargetkan untuk memastikan kinerja manajemen yang optimal (Sadeli, 2011:18).

Menurut Thomas H. Jones, manajemen mencakup tiga tahap penting

(Mukhofifah et al., 2016:16) yang, jika diterapkan pada manajemen

keuangan, dapat mengarah pada sinkronisasi yang efektif. Tahap-tahap

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tersebut adalah sebagai berikut:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

- a) Perencanaan. Tahap ini melibatkan perumusan anggaran, yang merupakan proses sistematis untuk menyiapkan rencana keuangan. Anggaran berfungsi sebagai kerangka operasional yang diartikulasikan dalam istilah kuantitatif, khususnya unit moneter, dan bertindak sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan kelembagaan selama periode yang ditentukan (Fattah, 2009:47).

Penting untuk memelihara catatan administrasi yang lengkap yang menunjukkan akuntabilitas atas pemanfaatan dana BOS secara berkala, dan tetap dapat diakses untuk audit yang dilakukan oleh entitas yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin keakuratan laporan keuangan, lembaga pendidikan diamanatkan untuk menerapkan praktik pembukuan yang komprehensif, yang harus dibuktikan dengan dokumentasi yang sesuai. Pembukuan yang dikelola oleh sekolah minimal harus mencakup RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diperlukan.

Hasil investigasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Dairi mengungkapkan bahwa penerapan dana BOS di sekolah belum mencapai standar efektivitas, efisiensi, dan transparansi yang diharapkan. Hal ini tercermin dari kurangnya ketersediaan informasi publik mengenai alokasi dana BOS oleh sekolah menengah atas di wilayah tersebut. Akibatnya, kurangnya transparansi ini menyebabkan beragamnya persepsi di antara orang tua, masyarakat, dan media tentang transparansi, efektivitas, dan efisiensi dana BOS yang diperuntukkan bagi sekolah. Menurut pedoman yang ditetapkan, transparansi sangat penting untuk pengelolaan dana tersebut dengan tepat.):

1. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama:

a) Mengenali kegiatan yang dimaksudkan untuk dilaksanakan selama periode anggaran.

b) Mengidentifikasi sumber pendanaan potensial, yang meliputi sumber daya keuangan, layanan, dan barang.

c) Menerjemahkan semua sumber yang diidentifikasi menjadi nilai moneter, karena anggaran pada dasarnya berfungsi sebagai laporan keuangan.

- d) Merumuskan anggaran dalam format yang telah mendapat persetujuan dari

lembaga terkait.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

e) Menyusun proposal anggaran untuk mendapatkan dukungan dari lembaga terkait

- f) Memodifikasi proposal anggaran sebagaimana diperlukan.
- g) Mendapatkan persetujuan untuk proposal anggaran yang diamandemen.
- h) Menyelesaikan proses persetujuan anggaran.

Menurut Nanang Fattah (2000: 23), anggaran pendidikan terdiri dari dua elemen yang saling terkait: anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan merupakan pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh sekolah, yang meliputi dana rutin dan insidental dari berbagai sumber resmi. Untuk SMP negeri, sumber pendapatan yang lazim adalah alokasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari orang tua siswa, dukungan masyarakat setempat, dan sumber lainnya. Sebaliknya, anggaran belanja mencerminkan total sumber daya keuangan yang ditetapkan setiap tahun untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan di sekolah.

Terkait sumber dana pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, khususnya Pasal 51 ayat 1, menetapkan bahwa dana pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di sini, "pemerintah" mengacu pada pemerintah pusat, sedangkan "pemerintah daerah" mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Masyarakat diwakili oleh orang tua atau wali siswa (Permendikbud, 2008: 20).

Contoh nyata dari pendidikan yang didanai pemerintah adalah dana BOS yang disalurkan melalui APBN. Tujuan utama Dana BOS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Dana ini secara khusus diperuntukkan untuk mengatasi beban operasional nonpersonalia di lingkungan lembaga pendidikan dasar. Penerima

UNIVERSITAS MEDAN AREA

program BOS meliputi seluruh sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama dan sederajat, serta Sekolah Dasar Satu Atap (SATAP), Pusat

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri), dan sekolah menengah atas/kejuruan di berbagai provinsi di Indonesia. Alokasi, komponen penggunaan, dan rincian teknis lainnya mengenai Dana BOS diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

2.1.2. DanaxBOS

a. Definisi DxnaxBOS

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, biaya operasional standar nonpersonalia adalah biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan nonpersonalia selama satu tahun yang merupakan bagian dari keseluruhan pendanaan pendidikan. Ketentuan ini menjamin agar lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan..

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 menjabarkan petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Tahun 2021. Dana ini utamanya diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran nonpersonalia bagi lembaga pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan program wajib belajar. Selain itu, dana ini juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2021, Dana BOS secara khusus ditetapkan sebagai Dana BOS Reguler yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada lembaga pendidikan dasar dan menengah.

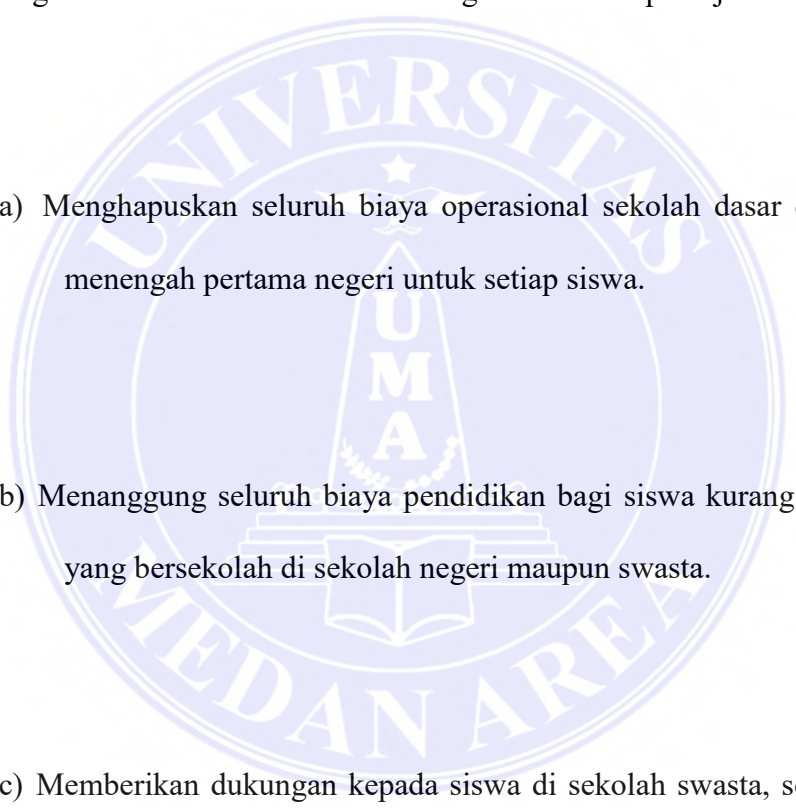
Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, ditetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pedoman pemanfaatan dana BOS Reguler adalah sebagai berikut:
 - (a) adaptif, artinya penyaluran dana BOS Reguler memperhatikan kebutuhan khusus Sekolah.;
 - (b) Efikasi mengacu pada cara sekolah mengalokasikan dana BOS Reguler untuk mencapai hasil yang diinginkan, memberikan pengaruh, dan memberikan nilai dalam mengejar tujuan pendidikan mereka.
 - (c) Efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan dana BOS Reguler yang strategis yang ditujukan untuk meningkatkan pembelajaran siswa sambil meminimalkan biaya dan memaksimalkan hasil.
 - (d) Akuntabilitas menandakan bahwa alokasi dan penggunaan dana BOS Reguler didukung oleh justifikasi yang logis sesuai dengan standar hukum.
 - (e) Transparansi menunjukkan bahwa penyaluran dana BOS Reguler dilakukan secara terbuka, dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan aspirasi pemangku kepentingan.

a. Tujuan Bantuan Dana BOS

Nomor 6 Tahun 2021 yang diberikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan utama dari bantuan dana BOS tahun 2021 adalah untuk meringankan beban keuangan masyarakat terkait pendidikan, khususnya dalam konteks memastikan pendidikan wajib sembilan tahun yang bermutu..

Program BOS secara khusus dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- 
- (a) Menghapuskan seluruh biaya operasional sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri untuk setiap siswa.
 - (b) Menanggung seluruh biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.
 - (c) Memberikan dukungan kepada siswa di sekolah swasta, sehingga dapat meringankan beban biaya operasional.

Tujuan Program dan Bantuan Dana

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS sebagaimana yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA dituangkan dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, sasaran dan

Document Accepted 8/1/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

alokasi dana program BOS adalah sebagai berikut:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

- 1) Sasaran program BOS adalah seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang didirikan atas inisiatif masyarakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
- 2) Alokasi anggaran BOS Reguler untuk sekolah penerima ditentukan dengan mengalikan biaya satuan dengan jumlah siswa terdaftar.
- 3) Pada ayat (1) ditetapkan biaya satuan sebagai berikut:
 - (a) Setiap tahun dialokasikan biaya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk satu orang siswa sekolah dasar; (b) setiap tahun dialokasikan biaya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk satu orang siswa sekolah menengah pertama; (c) setiap tahun dialokasikan biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang siswa sekolah menengah atas; (d) setiap tahun dialokasikan biaya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk satu orang siswa sekolah kejuruan; dan (e) setiap tahun dialokasikan biaya yang sama untuk siswa sekolah luar biasa (SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB)..

b. Sekolah yang Layak Mendapatkan Dana BOS

Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 yang menguraikan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, ketentuan berikut berlaku bagi sekolah yang layak menerima dana BOS:

- 1) Sekolah diberikan dana BOS secara berkala. Kategori sekolah yang termasuk adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- 2) Untuk memenuhi syarat, sekolah harus memenuhi kriteria berikut:
 - (a) melengkapi dan memperbarui Dapodik secara berkala untuk mencerminkan status sekolah terkini pada akhir tahun; (b) memastikan Dapodik terdaftar dengan nomor induk sekolah nasional;
 - (c) memiliki izin operasional yang berlaku bagi sekolah berbasis masyarakat yang tercantum dalam Dapodik; (d) mempertahankan jumlah siswa terdaftar minimal 60 (enam puluh) siswa dalam tiga (3) tahun terakhir; dan (e) tidak beroperasi sebagai unit pendidikan koperasi..

f) Memiliki paling sedikit 60 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah bertugas memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk mendapatkan alokasi dana BOS yang selanjutnya harus mendapat persetujuan dari Kementerian.

a. Jadwal Penyaluran Dana

Jadwal penyaluran dana BOS tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk tahun anggaran 2021, penyaluran dana BOS dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, yang meliputi semester II tahun ajaran 2020/2021 dan semester I tahun ajaran 2021/2022.
- 2) Penyaluran Dana BOS Reguler dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Penyaluran tahap I dilaksanakan setelah sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Penyaluran tahap kedua dilaksanakan setelah sekolah menyampaikan

laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya.

- (c) Penyaluran tahap ketigadilaksanakan setelah sekolah menyampaikan laporan penyaluran tahappertama tahun anggaran berjalan..

d. Pelaksanaan Organisasi

Sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS:

- 1) Kepala sekolah bertugas membentuk Tim BOS Sekolah untuk pengelolaan Dana BOS Reguler.

- 2) TimBOSSekolahdimaksudterdiri atas:

(a) kepala sekolah yang bertindak sebagaipimpinan ;

(b) bendahara sekola; dan

(c) anggota tim tambahan.

- 3) Anggota tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

(a) satu orang wakil dari tenaga pendidik;

(b) satu orang wakil dari Komite Sekolah; dan

anggota Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah berdasarkan kredibilitasnya dan tidak terdapat benturan kepentingan.

a. Komponen Pemanfaatan Dana

Sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, komponen pemanfaatan dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah memanfaatkan Dana BOS Reguler untuk membiayai biaya operasional sehari-hari yang berkaitan dengan program pendidikan, yang meliputi: (a) penerimaan siswa baru; (b) pengembangan perpustakaan;
- (c) penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler dan kependidikan;
- (d) kegiatan yang berkaitan dengan penilaian dan evaluasi pembelajaran;
- (e) penyelenggaraan kegiatan sekolah;
- (f) pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- (g) pembayaran tagihan listrik dan langganan layanan; (h) pemeliharaan prasarana dan sarana sekolah; (i) penyediaan sumber belajar multimedia;
- (j) penyelenggaraan pengembangan keterampilan dan kompetensi; dan

e. Tata Cara Pengelolaan

Sekolah bertanggung jawab mengelola dan melaporkan pemanfaatan Dana BOS Reguler sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Prinsip-prinsip berikut berlaku:

- 1) Pengelolaan Dana BOS Reguler dilakukan oleh sekolah berdasarkan kerangka manajemen berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan, mengawasi, dan mengelola program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan sekolah.
- 2) Hasil penilaian mandiri sekolah disebut perencanaan.
- 3) Dengan mengikuti pedoman pengelolaan Dana BOS Reguler, sekolah dapat mengidentifikasi metode yang paling efektif untuk mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas utama.
- 4) Sesuai dengan komponen pemanfaatan dana yang ditetapkan, Dana BOS Reguler dialokasikan secara eksklusif untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah...

- 1)

Pendistribusian Dana BOS Reguler harus ditetapkan melalui konsensus dan keputusan bersama yang dibuat oleh tim BOS Sekolah, pendidik, dan Komite Sekolah.
- 2) Hasil kesepakatan ini harus dicatat secara resmi dalam risalah rapat, yang harus ditandatangani oleh semua peserta yang hadir.
- 3) Konsensus mengenai alokasi Dana BOS Reguler harus memprioritaskan kebutuhan sekolah, menekankan inisiatif yang meningkatkan kualitas pembelajaran siswa.
- 4) Pengelolaan Dana BOS Reguler di sekolah terbuka harus melibatkan partisipasi manajer sekolah terbuka, sementara kepala sekolah induk memegang tanggung jawab penuh sesuai dengan otoritas yang ditunjuk.
- 5) Tugas tim BOS Sekolah diuraikan sebagai berikut:
 - (a) melengkapi dan memperbarui data sekolah secara akurat dan teratur di Dapodik, memastikannya mencerminkan keadaan sebenarnya dari lembaga;
 - (b) memikul tanggung jawab penuh atas keakuratan data sekolah yang dimasukkan ke dalam Dapodik;
 - (c) menyusun RKAS sesuai dengan

pengelolaan Dana BOS Reguler;

- (d) memasukkan RKAS ke dalam sistem yang ditetapkan oleh Kementerian;
- (e) mematuhi standar efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan DanavBOS Reguler ;

Menyelenggarakan dan memelihara catatannya administrasi untuk memastikan akuntabilitas pemanfaatan Dana BOS Reguler secara menyeluruh, serta menyusun dan menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Hal-hal yang perlu dilakukan terkait Dana BOS Reguler adalah:

- (a) Memberikan pengakuan atas penerimaan dana melalui situs web bos kemdikbud .go.id;
- (b) Membuat laporan pelaksanaan penggunaan DanaBOS Reguler melalui situs webvbo. kemdikbud. go .id;
- (c) Bertanggung jawab secara formal dan substantif atas pemanfaatan Dana BOS Reguler yang diterima;
- (d) Memberikan sanksi atas hasil audit yang dilakukan oleh badan berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah, termasuk yang bersumber dari DanavBOS Reguler dan sumber lainnya; dan
- (e) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

e. Tata Cara Pelaporan

Tata cara pelaporan dana BOS sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Sekolah wajib menyelenggarakan pembukuan yang saksama dan didukung dengan dokumen pendukung. Dokumen pembukuan yang wajib dimiliki sekolah antara lain:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber;
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- RKAS;
- buku kas umum;
- buku pembantu kas;
- buku pembantu bank;

Document Accepted 8/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

- buku pembantu paja ; dan.
Dokumentasi ain yang diperlukan.

(a) **Sekolah wajib** menyusun laporan lengkap yang memuat ketentuan sebagai berikut:

|| **Menyusun** ringkasan pelaksanaan Dana BOS Reguler, khususnya merinci pemanfaatan dana tersebut.

Berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler, pedoman berikut ditetapkan:

- Pelaporan pemanfaatan dana harus mencakup total pengeluaran Dana BOS Reguler yang dialokasikan untuk sekolah pada tahun anggaran yang bersangkutan.

- Laporan harus dibuat pada setiap tahap dan harus ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekola , dan Komite Sekolah, dengan salinan disimpan di sekolah.

- Sekolah yang berada di bawah pengelolaanP emerintah Daerah waji menyampaikan laporan rinci tentang pemanfaatan Dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

- Selain itu, sekolah wajib mengumumkan kepada publik semua laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran Dana BOS Reguler.

Dokumen yang wajib dipublikasikan harus memuat ringkasan Dana

pembiayaan. Laporan ini harus dipajang di papan informasi Sekolah atau di lokasi lain yang mudah diakses oleh publik..

Kewajiban kepala sekolah untuk melaporkan pemanfaatan Dana BOS

Reguler adalah dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- Tahap pelaporan awal wajib diselesaikan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
- Tahap pelaporan berikutnya wajib diselesaikan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- Tahap pelaporan akhir wajib diselesaikan paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya.

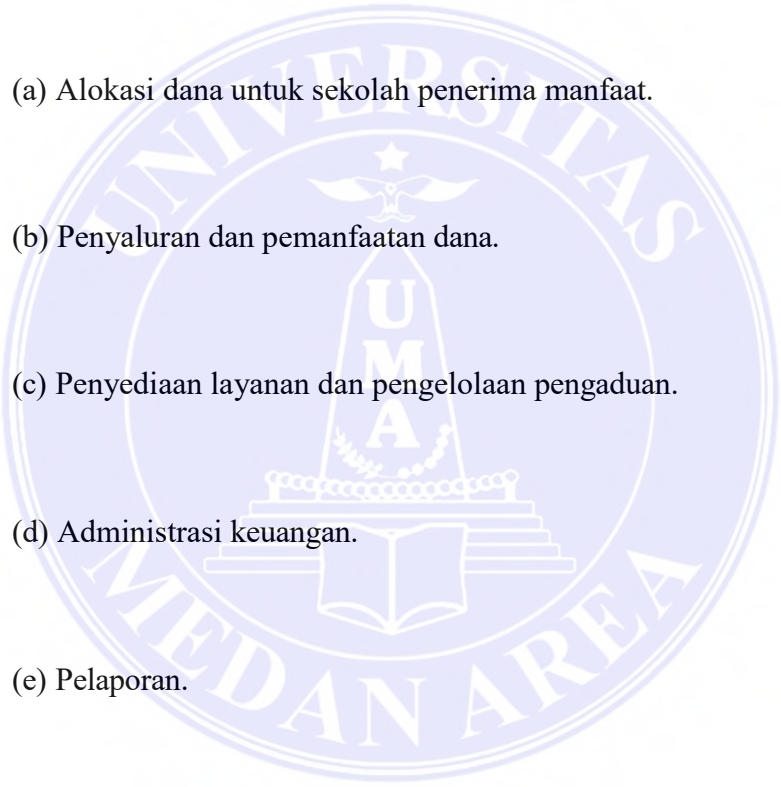
b. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Kepala Kantor bertugas memberikan pembinaan kepada kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS.
- 2) Pembinaan kepada kepala sekolah dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan teknis.
- 3) Kegiatan pemantauan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemantauan internal dan eksternal. Pemantauan internal dilakukan oleh Tim Pengelola BOS di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Pemantauan ini bercirikan supervisi klinis, yaitu melakukan

yang timbul selama pelaksanaan program BOS. Sedangkan pemantauan eksternal bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan menganalisis dampak, kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Pengawasan eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau badan independen lain yang memenuhi syarat.

4) Komponen utama yang menjadi sasaran pemantauan meliputi:

- 
- (a) Alokasi dana untuk sekolah penerima manfaat.
 - (b) Penyaluran dan pemanfaatan dana.
 - (c) Penyediaan layanan dan pengelolaan pengaduan.
 - (d) Administrasi keuangan.
 - (e) Pelaporan.

1) Pengawasan program BOS meliputi pengawasan inheren, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat..

(a) Pengawasan Inheren. Pengawasan jenis ini dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi terhadap bawahannya di berbagai tingkatan, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah. Fokus utama program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terhadap sekolah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Pengawasan Fungsional. Pengawasan internal program BOS dikelola

bersama dengan Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Badan-badan ini bertugas melakukan audit berdasarkan kebutuhan instansi atau atas permintaan instansi yang diaudit.

(c) Pengawasan Eksternal. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertindak sebagai badan pengawas eksternal program BOS. Badan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan atau atas permintaan instansi yang diperiksa.

(d) Pengawasan Masyarakat. Untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program BOS, warga masyarakat dan unit pengaduan di lingkungan sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan kantor pusat didorong untuk memantau program tersebut. Entitas-entitas ini mengawasi pelaksanaan program BOS di sekolah tetapi tidak melakukan audit. Jika ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program BOS, hal tersebut harus segera dilaporkan kepada badan pengawas fungsional atau otoritas terkait lainnya..

a. Larangan bagi Tim BOS Sekolah

1) Pengawasan program BOS meliputi pengawasan inheren (Waskat), pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

(a) Pengawasan Inheren. Pengawasan jenis ini dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi terhadap bawahannya di berbagai tingkatan, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekola .

Fokus utama program BOS adalah pengawasan yang dilakuka oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota terhadap sekolah.

(b) Pengawasan Fungsiona . Pengawasan internal program BOS dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, bersama dengan Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Badan-badan ini bertugas melakukan audit berdasarkan kebutuhan instansi atau atasv ermintaan instansi yang diaudit.

(c) Pengawasan Eksterna. Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) bertindak sebagai badan pengawas eksternal program BOS. Badan ini jugabertanggung jawab untuk melakukan auditsesuai kebutuhan atau atas permintaan instansi yang diperiksa .

(d) Pengawasan Masyarakat. Untuk menjamin adanya transparansi dalam pelaksanaan program BOS, masyarakat dan unit pengaduan di lingkungansekolah

Kabupaten/Kota, provinsi, dan kantor pusatdi imbau untuk melakukan pengawasan terhadap program tersebut. Lembaga-

lembaga tersebut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS di sekolah, tetapi tidak melakukan audit. Apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, Tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang keras untuk:

- (a) memindah ukukan DanaBOS Reguler ke rekening pribadi atau untuk keperluan lain di luar yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- (b) memperoleh bunga untuk keuntungan pribadi;
- (c) memberikan pinjaman kepada pihak ketiga;
- (d) membeli piranti lunak untuk pembiayaanBOS yangwajibvsegera dilaporkankepada instansi pengawas fungsional atauinstansivterkait lainnya..

2.1.2. Efektivitas Penggunaan Dana BOS

a. Konsep Efektivitas

Dari sudut pandang ekonomi, Drucker (sebagaimana dikutip dalam Soewartoyo, 2007:163) mendefinisikan efektivitas sebagai penilaian tindakan atau kualitas hasil yang dicapai dalam suatu tugas. Andi et al. (2015:56) lebih lanjut menguraikan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui upaya kooperatif. Mardiasmo (2009:134) berpendapat bahwa suatu tugas dianggap efektif jika menghasilkan satuan output dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perspektif ini sejalan dengan pernyataan Effendy (sebagaimana dirujuk dalam Sunardi, 2017:7) bahwa efektivitas diukur dari sejauh mana target atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya tercapai seperti yang direncanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merangkum pemahaman tentang suatu situasi, di mana metode tertentu digunakan untuk mencapai kualitas hasil tugas yang diinginkan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Richard M. Steers (sebagaimana dikutip dalam Rahmat et al., 2019:98-99)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi efektivitas kerja

Document Accepted 8/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dalam bukunya, Efektivitas Organisasi. Faktor-faktor ini meliputi:

1) Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi mencakup struktur dan teknologi suatu organisasi, yang dapat memengaruhi berbagai aspek efektivitas dengan cara yang berbeda. Istilah "struktur" mengacu pada hubungan yang ditetapkan dalam suatu organisasi mengenai pengaturan sumber daya manusia, khususnya bagaimana personel diorganisasikan untuk menyelesaikan tugas. Sebaliknya, "teknologi" berkaitan dengan proses yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran.

Karakteristik Lingkungan

Baik faktor lingkungan eksternal maupun internal diakui memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kerja. Meskipun kedua aspek ini sedikit berbeda, keduanya saling terkait. Lingkungan eksternal mencakup semua kekuatan yang ada di luar batas organisasi dan memengaruhi keputusan serta tindakannya. Dampak faktor-faktor ini terhadap dinamika organisasi biasanya dinilai melalui stabilitas lingkungan, kompleksitasnya, dan tingkat ketidakpastian yang ada. Sebaliknya, lingkungan internal, yang sering disebut sebagai iklim organisasi, mencakup berbagai karakteristik lingkungan kerja yang berkaitan dengan aspek efektivitas tertentu, khususnya yang dievaluasi pada tingkat individu. Kemampuan organisasi untuk menavigasi hubungannya dengan lingkungan eksternal tampaknya sebagian besar bergantung pada tiga variabel penting: prediktabilitas kondisi

lingkungan, keakuratan persepsi kondisi ini, dan tingkat rasionalisme

organisasi terhadap perubahan lingkungan..

1) Karakteristik Pekerja

In essence, the members of the organization serve as the most significant influencing factors, as their actions can either promote or obstruct the long-term attainment of organizational objectives. Employees are vital resources intricately linked to the management of all organizational assets, thus their conduct has a profound impact on the realization of these goals. Employees represent the primary capital within the organization, significantly affecting overall effectiveness; even the most advanced technology and well-structured systems become ineffective in the absence of a dedicated workforce.

2) Management Policy and Practices

Leaders fundamentally influence an organization's success by planning, coordinating, and facilitating activities aimed at achieving specific targets. It is incumbent upon leaders to ensure that the organizational structure aligns with and enhances the existing technology and environmental context. Additionally, leaders must implement an appropriate reward system that enables employees to fulfill their personal aspirations while simultaneously advancing the organization's objectives. This leadership function is arguably the most critical. As technological processes grow increasingly complex and environmental conditions become more challenging, the management's role in harmonizing personnel and processes for organizational success is not only becoming more arduous but also more essential.

b. Measuring Effectiveness

organization. It can be quantified by the organization's success or failure in meeting its established goals. When an organization successfully achieves its objectives, it can be deemed to have operated effectively..

Penting untuk memahami alat ukur efektivitas kinerja sebagaimana yang diuraikan oleh Richard dan M. Steers (dalam Rahmat et al., 2019:97-98), yang mencakup komponen-komponen berikut:

2) Kemampuan beradaptasi

Kemampuan manusia pada dasarnya terbatas, dan sebagai hasilnya, individu tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri; kolaborasi dengan orang lain sangat penting. Landasan keberhasilan organisasi terletak pada kemampuan untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Setiap individu yang memasuki suatu organisasi harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan rekan kerja dan lingkungan organisasi.

3) Kinerja Pekerjaan

Kinerja pekerjaan mengacu pada hasil yang dihasilkan oleh seorang individu saat melaksanakan tugas yang diberikan, yang dipengaruhi oleh keterampilan, pengalaman, dedikasi, dan manajemen waktu mereka. Perspektif ini menunjukkan bahwa kemampuan karyawan untuk memenuhi tanggung jawab mereka secara efektif bergantung pada keterampilan, pengalaman, komitmen, dan waktu yang mereka alokasikan untuk tugas-tugas mereka.

Kepuasan karyawan menunjukkan tingkat kepuasan yang dialami individu mengenai peran atau pekerjaan mereka dalam suatu organisasi. Ini mencerminkan sejauh mana individu merasa mereka menerima penghargaan dan pengakuan yang tepat dari berbagai aspek lingkungan kerja mereka dan organisasi secara keseluruhan..

2) Keunggulan

Keberhasilan kinerja organisasi bergantung pada mutu layanan atau produk utamanya. Kualitas dapat memiliki banyak bentuk operasional yang berbeda, yang sebagian besar ditentukan oleh jenis barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan.

3) Evaluasi oleh Pihak Luar

Mereka (individu atau organisasi) di lingkungan langsung organisasi memberikan evaluasi terhadap organisasi atau unit organisasi, termasuk

orang-orang yang berkomunikasi dengan organisasi, loyalitas, kepercayaan, dan dukungan yang telah ditunjukkan oleh publik dan pejabat, antara lain, terhadap lembaga.

a. Efisiensi Pemanfaatan Dana BOS

UNIVERSITAS MEDAN AREA Dengan cara penggunaan dana BOS di sekolah, jika uang dialokasikan

maka dana tersebut termasuk dalam kategori efektif. Sekolah juga dapat membuat keputusan yang bertujuan untuk melibatkan warga sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan BOS.

Tujuan utama dari proses pengambilan keputusan partisipatif BOS adalah untuk memperkuat rasa kepemilikan setiap siswa. Warga sekolah akan lebih berkomitmen terhadap lembaga mereka sebagai hasil dari rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang meningkat ini.

Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, merampingkan birokrasi, dan menerapkan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, penerapan BOS berupaya untuk meningkatkan standar pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan, kemampuan beradaptasi dalam administrasi kelas dan sekolah, serta peningkatan mutu kepala sekolah dan guru adalah cara untuk meningkatkan BOS. Menurut penjelasan yang diberikan di atas, kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) dimaksudkan untuk meringankan beban keuangan bagi siswa dari latar belakang yang kurang mampu dan mendukung siswa lain agar memungkinkan mereka menerima layanan pendidikan yang lebih berkualitas hingga mereka lulus dalam konteks menyelesaikan pendidikan normal sembilan tahun. Meningkatkan pemerataan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan merupakan tujuan utama lainnya dari penerapan kebijakan BOS. Melakukan hal itu akan meningkatkan persepsi dan akuntabilitas publik sekaligus meningkatkan kualitas, daya saing, dan relevansi pendidikan..

2.1.3. Efisiensi Penggunaan Dana BOS

UNIVERSITAS MEDAN AREA **Konsep Efisiensi**

Efisiensi menurut Maududy (2018:224) merupakan perbandingan antara jumlah sumber daya yang dikonsumsi (resource) dengan tingkat keluaran yang dihasilkan (outcome). Hal ini sesuai dengan pendapat Aziz (2017:7) bahwa efisiensi merupakan tindakan menghasilkan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sesuatu sebaik-baiknya dengan memanfaatkan waktu yang ada dalam mengerjakannya. Apabila tujuan dapat dicapai dengan usaha dan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin, maka kegiatan tersebut dikatakan efisien (Mulyasa, 2009:88). Tujuan dari efisiensi ini adalah tercapainya tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan sebaik-baiknya. Efisiensi menurut Mulyasa (2009:89) juga merupakan perbandingan antara biaya dan kesenangan serta input dan output, tenaga dan hasil, pengeluaran dan input. Peningkatan ketersediaan, mutu, relevansi, dan daya saing layanan pendidikan merupakan cara mengelola dana pendidikan secara efisien (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008). Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Uwes & Rusdiana (2017:229) bahwa efisiensi pendidikan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memperhatikan tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan sarana.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa asas efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah pemberdayaan sumber daya keuangan sekolah dalam rangka mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing layanan pendidikan.

a. Evaluasi Efisiensi

Menurut Fattah (2009) untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan biasanya digunakan metode analisis efektivitas biaya. Terkait dengan efisiensi, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Efisiensi Internal

Suatu sistem pendidikan dikatakan memiliki efisiensi internal apabila dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya yang minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Efisiensi internal sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu faktor kelembagaan dan faktor manajerial. Dalam rangka mewujudkan efisiensi internal, maka perlu dilakukan upaya pengurangan biaya pendidikan melalui berbagai jenis kebijakan, antara lain:

- Pengurangan biaya operasional
- Pemberian prioritas biaya anggaran pada komponen input yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran
- Peningkatan kapasitas pemanfaatan ruang kelas dan sarana belajar lainnya
- Peningkatan kualitas proses belajar mengajar
- Peningkatan motivasi kerja guru
- Peningkatan rasio guru-siswa

1) Efisiensi eksternal

Pendekatan analisis biaya-manfaat sering dikaitkan dengan efisiensi eksternal, yaitu rasio total pengeluaran yang dikeluarkan untuk pendidikan terhadap keuntungan finansial pendidikan (biasanya dinyatakan dalam bentuk pendapatan). Ketika memutuskan kebijakan untuk membagi pengeluaran

pendidikan atau mendistribusikan dana ke semua subsektor pendidikan, analisis

efisiensi eksternal sangat membantu

Tujuan utama harus menjadi fokus dari setiap upaya untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa hal utama yang perlu diarahkan:

- Akses yang adil (atau kesempatan yang sama) terhadap pendidikan

Pemerataan kemungkinan untuk berhasil dalam pembelajaran (kesetaraan hasil); Pemerataan kesempatan untuk terus bersekolah (kesetaraan kelangsungan hidup); Pemerataan kesempatan untuk menuai manfaat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari (kesetaraan hasil).

Sementara itu, Psacharopoulos menyatakan bahwa tingkat pencapaian pendidikan dipengaruhi oleh efisiensi eksternal dan efisiensi internal. Menurut Psacharopoulos (1981), efisiensi eksternal disebabkan oleh tiga faktor: 1) pencapaian pendidikan investor pada saat investasi; 2) dampak pendidikan dasar lebih besar daripada dampak pendidikan yang lebih terspesialisasi (berlaku di negara-negara berkembang); dan 3) pengembalian investasi pendidikan yang tinggi membuatnya menguntungkan bagi investor. Sementara itu, efisiensi internal lebih diprioritaskan pada skala kecil, seperti mutu pendidik, infrastruktur dan fasilitas sekolah, serta buku-buku yang digunakan untuk menghasilkan siswa bermutu tinggi..

b. Efisiensi Penggunaan Dana BOS

Efisiensi eksternal sering dikaitkan dengan analisis biaya-manfaat. Dana BOS merupakan salah satu unsur penting dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah ini ditujukan untuk pemanfaatan yang optimal dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-

UNDANG-UNDANG BERLAKU. Untuk mencapai hasil yang efektif, prinsip-prinsip

pengawasan sangat penting untuk diterapkan.

Tahap perencanaan harus melibatkan konsensus di antara semua pemangku kepentingan dalam lembaga pendidikan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab mereka yang terlibat dalam realisasi program. Banghart dan Trull menekankan bahwa perencanaan harus mencakup berbagai peserta untuk mengembangkan program yang berpusat pada siswa (Sagala dalam Noor Monita, 2021:54).

Selama tahap pengorganisasian, beberapa komponen harus diperhatikan: 1) tugas, 2) personel, 3) hubungan, dan 4) lingkungan (Terry dan Rue dalam Noor Monita, 2021:55). Pelaksanaan dana BOS harus mematuhi asas keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Diknas dalam Noor Monita, 2021:55). Pengawasan yang efektif mensyaratkan penetapan kriteria dan indikator penilaian yang jelas. Proses penilaian ini melibatkan penetapan standar yang jelas, pengukuran hasil pelaksanaan, perbandingan hasil tersebut dengan standar yang ditetapkan, dan melakukan koreksi yang diperlukan dalam menanggapi setiap ketidaksesuaian yang teridentifikasi (Buseri dalam Noor Monita, 2021:56).

2.1.4. Transparansi Penggunaan Dana BOS

a. Konsep Transparansi

Transparansi, sebagaimana didefinisikan oleh Hafiz (2014:11), melibatkan penyediaan informasi keuangan yang benar dan dapat diakses oleh publik, yang didasarkan pada prinsip bahwa publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan.

Demikian pula, Mahmudi (2011:17) menggambarkan transparansi sebagai

kemauan suatu organisasi untuk berbagi informasi mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik dengan para pemangku kepentingan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020, pengelolaan dana BOS Reguler harus dilakukan secara transparan dan harus mencerminkan aspirasi para pemangku kepentingan yang selaras dengan kebutuhan sekolah.

Dari definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa transparansi berkaitan dengan keterbukaan sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

Tujuan utama transparansi adalah untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan publik, yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi yang akurat kepada mereka yang membutuhkan. Werren Bennis (sebagaimana dikutip dalam Hadisansoso et al., 2021:249) menegaskan bahwa tujuan transparansi adalah untuk menjamin keterbukaan kepada publik terhadap seluruh program atau kegiatan yang dilakukan, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan kepercayaan serta kolaborasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Manfaat transparansi antara lain adalah terjalinnya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyebaran informasi, serta menjamin kemudahan akses informasi yang akurat dan jelas..

b. Transparansi Penggunaan Dana BOS

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020,

UNIVERSITAS MEDAN AREA pada Pasal 14 ayat 1 yang mengatur bahwa "Pengelolaan dan

Document Accepted 8/1/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

sesuai dengan kewenangannya."

Sekolah bertanggung jawab mengelola dana BOS Reguler dengan berpegang pada prinsip manajemen berbasis sekolah. Hal ini berarti sekolah diberi kewenangan untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Sekolah memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan dana BOS Reguler berdasarkan prioritas kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan yang ditetapkan.

Pengalokasian dana BOS Reguler harus berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk notulen rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Kesepakatan mengenai penggunaan dana BOS Reguler hendaknya mengutamakan kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya yang berfokus pada inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa di sekolah.

Pengelolaan dana BOS Reguler di sekolah dilaksanakan oleh tim BOS Sekolah. Tim ini ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan terdiri dari Kepala Sekolah yang ditunjuk sebagai pimpinan, bendahara, perwakilan dari staf pengajar, anggota Komite Sekolah, dan orang tua atau wali siswa yang bukan anggota Komite Sekolah. Pemilihan anggota ini dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, dengan mempertimbangkan kredibilitas mereka dan menghindari potensi konflik kepentingan..

Tugas tim BOS Sekolah meliputi: memasukkan dan memutakhirkan data

UNIVERSITAS MEDAN AREA lengkap dan valid secara akurat dan tepat waktu ke dalam Dapodik,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/25

memastikan kesesuaian dengan kondisi Sekolah yang sebenarnya, dan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan Sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

bertanggung jawab penuh atas hasil dari proses entri data tersebut.

Sekolah peserta Dapodik wajib menyusun RKAS dengan berpegang pada asas-asas efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS Reguler. Sekolah wajib memasukkan RKAS ke dalam sistem yang ditetapkan oleh Kementerian, memastikan kepatuhan terhadap asas-asas tersebut dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS Reguler.

Selain itu, akuntabilitas administratif pemanfaatan dana BOS Reguler harus dijaga secara menyeluruh. Termasuk penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekolah wajib melakukan verifikasi penerimaan dana melalui platform bos.kemdikbud.go.id, pelaporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui platform yang sama, dan siap diaudit oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang bersumber dari dana BOS Reguler maupun sumber lainnya. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan menangani keluhan masyarakat..

2.1.5. Kinerja Kepala Sekolah dalam Penggunaan Dana BOS

a. Konsep Kinerja Kepala Sekolah

Rivai (2005:14) menegaskan bahwa kinerja mencerminkan keberhasilan atau pencapaian keseluruhan individu dalam jangka waktu tertentu saat melaksanakan tugas, dievaluasi terhadap berbagai tolok ukur seperti standar kerja

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan target, atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang telah

dihasilkan oleh individu dalam memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunagara, 2013:22).

Menurut Arifin & Barnawi (2014:72), kinerja menunjukkan hasil yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi, selaras dengan wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan, sambil berusaha untuk memenuhi tujuan organisasi dengan cara yang sah, mematuhi standar etika.

Wahjosumidjo (2002:83) menggambarkan kepala sekolah sebagai pendidik fungsional yang bertugas memimpin sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk proses belajar mengajar, memfasilitasi interaksi antara instruktur dan siswa. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kepala sekolah harus mampu menjalankan berbagai perannya secara efektif, termasuk peran sebagai pendidik, manajer pendidikan, administrator, supervisor guru, pemimpin, inovator, dan motivator. Penguasaan kompetensi tersebut sangat mempengaruhi kinerja kepala sekolah (Muzakar dalam Liskayani et al., 2019:67).

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja kepala sekolah merupakan indikasi keberhasilannya dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam manajemen sekolah dan dalam mencapai tujuan lembaga. Untuk mencapai kinerja yang terpuji, kepala sekolah harus memiliki keterampilan tingkat lanjut dalam bidang administrasi sekolah.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Sebagaimana diuraikan oleh Kia (2020:449), beberapa faktor

UNIVERSITAS MEDAN AREA mempengaruhi kinerja, termasuk:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Efektivitas dan Efisiensi

Suatu kegiatan dianggap efektif jika pada akhirnya mencapai tujuan tertentu. Namun, jika hasil kegiatan tidak sejalan dengan tujuan yang dimaksudkan, yang mengarah pada kurangnya kepuasan meskipun efektif, kegiatan tersebut dianggap tidak efisien. Sebaliknya, jika hasil yang diinginkan tidak penting atau tidak signifikan, kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai efisien.

2. Otoritas

Otoritas mengacu pada kapasitas seorang individu dalam organisasi formal untuk mengomunikasikan arahan kepada anggota lain, membimbing mereka dalam pelaksanaan kegiatan kerja berdasarkan peran mereka. Otoritas ini menggambarkan tindakan yang diizinkan dalam organisasi.

3. Disiplin

Disiplin mencakup kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, disiplin karyawan berkaitan dengan komitmen karyawan untuk menghormati perjanjian kerja yang dibuat dengan organisasinya.

4. Inisiatif

UNIVERSITAS MEDAN AREA Inisiatif melibatkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan

tujuan organisasi..

b. Kinerja Kepala Sekolah dalam Penggunaan Dana BOS

Pengelolaan sekolah dasar juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana BOS. Tugas kepala sekolah menuntutnya untuk memiliki pengetahuan manajerial. Agar tujuan sekolah yang ditetapkan dapat tercapai, pihak terkait setidaknya dapat merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan anggota, memberdayakan berbagai sumber daya organisasi, serta melakukan penilaian (Azhar dalam Albiy & Yahya, 2021:2279).

Untuk menjadi sekolah yang efektif, administrator harus membimbing dan menginspirasi seluruh warga sekolah, termasuk guru, staf, siswa, orang tua, dan masyarakat, untuk berkolaborasi guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kepala sekolah yang sukses harus menerapkan pendekatan kepemimpinan terbaik untuk situasi yang dihadapi, dengan mempertimbangkan sifat dan keterampilan bawahannya juga (Andriani, 2011:60).

Sering disebut sebagai "teori lima faktor," sebuah studi oleh Sadker, D. M., & Zittleman mengidentifikasi lima elemen kunci sekolah yang sukses (lihat Stenger, 2013). Kelima atribut tersebut adalah sebagai berikut: (1) kepemimpinan yang baik; (2) standar yang tinggi bagi guru dan siswa; (3) evaluasi berkelanjutan terhadap pertumbuhan dan kinerja siswa; (4) tujuan dan pedoman yang ditetapkan dengan baik; dan (5) keselamatan dan kenyamanan anak-anak. Kelima elemen ini akan meningkatkan prestasi siswa dan meningkatkan standar pengajaran yang ditawarkan sekolah. Penelitian serupa menunjukkan bahwa sekolah yang paling sukses menumbuhkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang sangat tinggi. Hubungan orang tua-sekolah yang kuat, pembelajaran yang berpusat pada siswa, pedoman pembelajaran yang koheren, prosedur yang efisien untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA meningkatkan kapasitas profesional guru, dan kepemimpinan yang kuat adalah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Si Empat Nempu Hilir yang berlokasi di Kabupaten Dairi.

3.1.2. Lama Penelitian

Penelitian berlangsung dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022.

3.2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, dengan menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui instrumen kuesioner.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 3 SMA Negeri 1 Si Empat Nempu Hilir tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 144 siswa, 24 guru, dan 4 staf. Sampel penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 122 orang. Pemilihan sampel ini didasarkan pada karakteristik atau kondisi tertentu yang relevan dengan penelitian (Riduwan dan Akdon, 2010:240). Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, rumus Taro Yamane diterapkan:

$$n = N / (1 + N * d^2)$$

dimana:

d = Presisi yang diinginkan

Berdasarkan data yang diberikan, perhitungan ukuran sampel adalah sebagai berikut:
 $N = 172$ siswa, dengan tingkat presisi 5%.

$$n = 172 / (1 + 172 * (0,05)^2)$$

$$n = 172 / (1 + 172 * 0,0025)$$

$$n = 172 / (1 + 0,43)$$

$$n = 172 / 1,43$$

$n = 122,27$, yang dibulatkan menjadi 122 siswa.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Data yang dikumpulkan bersumber dari Juknis Pelaksanaan, Program Kerja Tim BOS, Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS, dan sumber sejenisnya dengan menggunakan pendekatan dokumentasi.

b. Metode observasi merupakan jenis penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan.

c. Efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan dan BOS yang dilakukan peneliti dinilai dengan menggunakan pendekatan angket.

Angket yang digunakan peneliti berupa lembar validasi ahli.

d. Informasi yang mendalam mengenai variabel penelitian diperoleh dalam penelitian ini melalui pendekatan wawancara.

3.3. Definisi Operasional dan Definisi Variabel

3.3.1. Definisi Variabel

Variabel penelitian didefinisikan sebagai “segala sesuatu dalam bentuk apa pun yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti sehingga diperoleh informasi tentangnya, kemudian ditarik kesimpulan” (Sugiyono, 2016:38).

1. Variabel bebas atau variabel independen

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi, menyebabkan, atau bermanifestasi sebagai variabel terikat, menurut Sugiyono (2016:39).

Variabel bebas (variabel bebas) (X) dalam penelitian ini adalah:

- a) Kinerja (X1)
- b) Efektivitas (X2)
- c) X3 Transparansi

2. Variabel terikat, atau variabel terikat

Variabel yang dipengaruhi oleh atau hasil dari variabel bebas disebut variabel terikat. Menurut Sugiyono (2016:39),

Kinerja Pokok (Y) merupakan variabel terikat penelitian (variabel terikat).

3.2.1: Pengertian Operasional

Penulis menggunakan prosedur berikut untuk mencegah terjadinya perbedaan

tanggapan tentang pemahaman frasa yang digunakan dalam variabel

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang penelitian ini:

Document Accepted 8/1/25

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25

1. Istilah "efektivitas" mengacu pada pemahaman situasi di mana teknik



diterapkan untuk menghasilkan hasil kerja yang sempurna.

2. Efisiensi adalah praktik menciptakan sesuatu sebaik mungkin dengan memanfaatkan waktu yang tersedia saat mengerjakannya.
3. Masyarakat berhak mengetahui secara bebas dan lengkap tentang akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan dalam mematuhi hukum dan peraturan. Transparansi adalah tindakan memberikan informasi keuangan yang jujur dan transparan kepada masyarakat.
4. Kinerja kepala sekolah menunjukkan seberapa sukses ia mengelola sekolah dan mencapai tujuannya dalam menjalankan tugasnya..

3.3. Teknik Analisis Data

3.3.1. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi berganda didasarkan pada pengujian asumsi klasik, yang diselesaikan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas data merupakan salah satu praduga yang harus dipenuhi agar simpulan hasil pengujian bebas dari bias.

Uji Normalitas Data (3.3.1.1)

Tujuan uji normalitas adalah untuk menentukan apakah distribusi variabel dependen terdistribusi normal atau tidak untuk nilai variabel independen tertentu. Asumsi ini direpresentasikan dalam model regresi linier oleh nilai galat terdistribusi normal (ϵ). Model regresi yang sesuai untuk pengujian statistik dan memiliki distribusi normal atau hampir normal dianggap sebagai model yang baik. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dalam perangkat lunak SPSS digunakan untuk penilaian normalitas data. Singgih Santoso (2012:393) menyatakan bahwa kriteria berikut dapat digunakan untuk mendasarkan keputusan tentang profitabilitas (Signifikansi Asimtotik): - Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, distribusi model regresi adalah normal.

- Distribusi model regresi tidak normal jika probabilitasnya kurang dari 0,05.

Tujuan uji normalitas adalah untuk menentukan apakah nilai galat prediksi model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi data residual yang normal atau hampir normal mencirikan model regresi yang efektif. Uji Kolmogorov Smirnov dengan Program SPSS21 merupakan uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini..

Pengujian korelasi antar variabel independen dalam model regresi merupakan tujuan dari uji multikolinearitas. Suatu keadaan disebut multikolinearitas jika terdapat korelasi. Ketika variabel independen dihilangkan dari suatu model regresi, maka model tersebut dianggap berhasil jika tidak terdapat hubungan di antara variabel tersebut (Singgih Santoso, 2012:234). Nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas. Model regresi dengan angka toleransi mendekati 1 dianggap bebas dari multikolinearitas. Tidak terdapat tanda-tanda multikolinearitas jika angka VIF kurang dari 10. Batasan VIF adalah 10. Singgih Santoso (2012:236) menyatakan bahwa rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.:

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance}} \text{ atau } \text{Tolerance} = \frac{1}{VIF}$$

3.3.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika tidak terjadi perubahan varians antara residual dua pengamatan, maka disebut homoskedastisitas; jika terjadi perubahan, maka disebut heteroskedastisitas. Model homoskedastisitas atau model

UNIVERSITAS MEDAN AREA mengalami heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik.

Dalam percobaan ini, digunakan metode uji korelasi peringkat Spearman.

3.3.2: Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan metode statistik yang populer untuk menguji hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Persamaan analisis regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai berikut, menurut Sugiyono (2016:188):

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

Y merupakan nilai estimasi variabel Kinerja Pokok, sedangkan a menunjukkan konstanta atau skenario di mana harga X sama dengan nol. Hasil kali b_1b_2 menandakan koefisien arah regresi, yang menunjukkan variasi nilai Y yang diakibatkan oleh perubahan nilai X. Variabel-variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut: X1 sesuai dengan Efektivitas, X2 sesuai dengan Efisiensi, dan X3 sesuai dengan Transparansi.

3.3.2. Analisis Korelasi Parsial

Untuk menilai kekuatan atau kelemahan hubungan antara variabel independen dan dependen, koefisien korelasi dihitung. Dalam konteks hubungan variabel linier, korelasi Pearson Product Moment (r) berlaku, seperti yang diuraikan di bawah ini.

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

$\sum X$ = Skor agregat untuk item pertanyaan yang terkait dengan variabel X

$\sum Y$ = Skor agregat untuk item pertanyaan yang terkait dengan variabel Y

3.3.2. Analisis Korelasi Berganda

Analisis Korelasi Berganda berfungsi untuk menilai validitas atau intensitas hubungan antara semua variabel independen dalam kaitannya dengan variabel dependen pada saat yang sama. Seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono (2016:191), koefisien korelasi dapat dinyatakan dengan cara berikut.:

$$R_{yx_1x_2x_3} = \sqrt{\frac{r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2 - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2x_3}}{1 - r_{x_1x_2x_3}^2}}$$

R (yx1x2x3) merupakan korelasi antara variabel x1, x2, dan x3 terhadap variabel Y. Korelasi momen produk antara X1 dan Y dilambangkan sebagai r_{yx1}. Demikian pula, r_{yx2} menunjukkan korelasi momen produk antara X2 dan Y, sedangkan r_{yx3} menandakan korelasi momen produk antara X3 dan Y. Lebih lanjut, r_{x1x2x3} mengacu pada korelasi momen produk antara X1, X2, dan X3.

3.3.2. Kerangka Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan pengujian parsial (uji-t) dan pengujian simultan (uji-f). Hipotesis yang diuji berkaitan dengan variabel independen: Efektivitas, Efisiensi, dan Transparansi, serta variabel dependen, Kinerja Kepala Sekolah. Sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2016:195), hipotesis dicirikan sebagai:

"Hipotesis berfungsi sebagai respons sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang biasanya disusun sebagai pertanyaan. Disebut sementara karena respons tersebut semata-mata berasal dari bukti empiris yang dikumpulkan melalui pengumpulan data."

Analisis yang dilakukan adalah uji parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji statistik-t. Penilaian ini menentukan ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari setiap variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2016:184), hal ini dilakukan dengan menggunakan rumus berikut.:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Koefisien korelasi, atau r

t adalah nilai koefisien korelasi, dan jumlah sampel (n) direpresentasikan dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1.

3.3.1.3. Uji Serentak (Uji F)

Untuk menentukan apakah faktor-faktor independen secara kolektif memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen, digunakan uji statistik F, yang sering dikenal sebagai uji F. Sugiyono (2016:192) telah menunjukkan bahwa uji F didefinisikan dengan rumus berikut:

Keterangan: Nilai uji $F_n = F$

k = Jumlah variabel independen; r = Koefisien Korelasi Berganda n = Ukuran sampel dalam angka

3.3.1.3. Uji Koefisien Determinasi

Setelah besarnya koefisien korelasi diketahui, langkah selanjutnya adalah mencari nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Analisis ini digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Kd = r^2_{xy} \times 100\%$$

Dimana :

Kd = koefisien determinasi

r^2_{xy} = koefisien korelasi berganda

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Akuntabilitas memberikan dampak positif dan substansial terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA SASAMA. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang meningkat dikaitkan dengan peningkatan efektivitas pengelolaan dana BOS; sebaliknya, penurunan akuntabilitas dapat mengakibatkan penurunan efektivitas.

2. Transparansi juga menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BO . Dengan demikian, transparansi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS

3. Jika dipertimbangkan secara kolektif, akuntabilitas dan transparans secara signifikan memengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA SASAMA. Hubungan ini selanjutnya diperkuat oleh perhitungan manual dan Koefisien Determinasi (R-Square).). Efektivitas pengelolaan dana BOS diukur sebesar 0,842, setara dengan 84,2%. Variabel lain yang memengaruhi efektivitas in , yang tidak menjadi bagian dari penelitian, ditunjukkan oleh nilai epsilon (ϵ) sebesar 0,158, atau 15,8% (1 - R-Square). Faktor-faktor tambahan ini mencakup kejelasan dalam tujuan anggaran, pengawasan keuangan, akuntabilitas dalam praktik akuntansi, dan penganggaran berbasis kinerja, antara lain. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi diajukan: 1. Sangat penting untuk menerapkan alokasi dana yang tepat sasaran, terutama untuk dukungan siswa yang kurang mampu dan untuk setiap kategori pengeluaran,

memastikan bahwa penerapan dana BOS terutama ditujukan untuk memberi manfaat bagi siswa ini. Selain itu, pedoman standar harus ditetapkan untuk mengidentifikasi siswa kurang mampu...

1. Ketentuan mengenai pemanfaatan 13 jenis dana tersebut perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan fleksibilitas dan mendukung program sekolah yang dituangkan dalam RAPBS. Fleksibilitas penggunaan dana berdasarkan kesepakatan daerah perlu diberikan, sehingga dapat disesuaikan dengan ketersediaan dan pemanfaatan sumber dana lain, termasuk dari APBD. Selain itu, untuk menjamin penyusunan RAPBS melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait di tingkat sekolah, seperti guru, komite, dan orang tua, RAPBS perlu dilengkapi dengan notulen rapat dan catatan kehadiran orang tua. Selain itu, sistem pelaporan, pemantauan, dan evaluasi perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas publik yang lebih besar. Sekolah harus membuat laporan per semester agar tidak membebani mereka dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Terakhir, untuk memperkuat mekanisme kontrol pengelolaan program BOS di berbagai tingkat pengelolaan, perlu dipertimbangkan untuk mengubah kerangka pengelolaan dari dana dekonsentrasi menjadi dana alokasi khusus (DAK). Pergeseran ini akan memberdayakan otoritas daerah untuk menetapkan target program, yang dengan demikian meningkatkan efektivitas, kejelasan dalam akuntabilitas, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan dan pengendalian..

Daftar Pustaka

- Achmad, M. (2008). Teknik Simulasi dan Pemodela . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Albiy, R dan Yahya, (2021). Efektifitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta pada Masa Pandemi Covid 1 . Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol 3(5)
- Andi, M dkk, (2015). Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Di Kabupaten Pidi . *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol 3(4).
- Amin, Anwar, (2016). Dimensi Karakteristik Laporan Keuangan Pemerinta . *Jurnal Akuntans* Vol 10(3).
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/9685>
- Amirin,(2013). Pembiayaan dalam Pendidika . *Jurnal Akuntansi Pendidikan*. Vol 2(1)
- Andriani, . E, (2011). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Upaya. *Jurna Manajemen Pendidika* , Vol 1(1)
- Arief, .Rudyanto., (2011) Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP dan MYSQL, And , Yogyakarta
- Arifin. M, & Barnawi, (2014) Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah upaya Upgrade Kapasitas Kerja Pengawas Sekolah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arifin dkk, 2019). Perancangan Laporan Keuangan Berbasis *Online* Dalam Rangka Peningkatan Usaha Tahu Goreng Di Wilayah Sumedang Jawa Barat. *Jurnal Imliah Akuntansi dan Keuanga*. Vol 1(2).
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/12/14>
- Aziz, , (2017). Pembiayaan DanEfisiensi Pendidika . *Ijtimaiyah Jurnal Ilmu Sosia Dan Budaya* Vol 1(2)

- Baridwan, Zaki, 2004, *Intermediate Accounting Edisi Kedelapan*, Yogyakarta: BPF
- Bate'e Mariah, (2018).
Efektivitas Fungsi Pengawasan Dalam Pendistribusian Raskin Di Desa Tetehosi I Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Vol 1(2)
- Batlajery Samuel, (2019). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung TambatK abupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. Vol 7(2).
- Bertha Sidik, (2014). Pemrograman Web dengan PHP. Santika Kencan . Solo
- Bovee *et al.* (1993). *Business Communication Toda . Fifth Editio . Upper Saddle Rivet, New Jerse , Prentice Hall*
- Cayaraya, Sarliaji, (2014).
Model Layanan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia <http://repository.upi.edu/11779/>
- Choliq Abdul (2011). Pengaruh Professional Learning Community Terhadap Pengembangan Profesi Guru Pada Madrasah Aliyah Negeri Di Provinsi Lampung. *Disertasi* (online)
<https://core.ac.uk/download/pdf/295426238.pdf>
- Dufour *et al* (2020). Dufour et a ., 2020. Managers' Views on Riparian Vegetation Management in France. Report, COST Action CA16208 CONVERGES
- Erlinawati dan Badrus, 2018). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Di SMAN1 Papar Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018 *Jurnal Intelektual* Vol 8(3)
- Emrinaldi Nur (2011). Pelaporan Keuangan Berbasis Internet (*Internet Financial Reportin*):
Pengaruh Format Penyajian Informasi Keuangan Terhadap Kinerja Pembuat Keputusan Investasi.
<https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/8897>
- Fatah, Nanan , (2009). Landasan Manajemen Pendidikan, Cet. 9 Bandung:

- _____, (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Fauziyya _____ dkk, _____ (2018). Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*. Vol 6(1).
- Fayol (1916). *Industri dan Manajemen Umum*, Terj. Winardi, London Sir Issac and Son 1985.
- Ferdi, (2013). *Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis Financing of Education: A Theoretical Stud*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol 19(4) .
- Fitriani, dk , (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Voluntary Auditor Switching di Perusahaan Manufaktur Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 200 - 2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 1(2)
- Fitri Afrilliana (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi *Jurnal*. Vol 2(1)
- Istijarti *et al*, (2019). Implementation of Management Based School in Improving the Quality of Secondary Education, *International Journal for Educational and Vocational Studie*. Vol 1(8)
- Hadisantoso, E dkk, (2021). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Selama Masa Pandemi Covi -19 Di Smp Negeri 1 Kendar. *Jurnal Akuntans dan Keuangan (JAK)* V 16(1)

- Hafiz, Abdul, (2014). *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik* Yogyakarta: BPFE UGM.
- Julantika *et al*, (2017). Accountability of School Operational Assistance (Case Study in SDN Pringgowirawan 02 Jember). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol 4(1)
- Kia, P. (2020). Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah Dalam Mengelola Keuangan Sekolah Di Sdibaopukang Kecamatan Nagawutun . *Jurnal Mitra Pendidika (JMP Online)* Vol 4(7)
- Koontz, H (1961). The management theory jungle, *Journal of the Academy of Management*, (online) Vol 4(3).
<https://maaw.info/ArticleSummaries/ArtSumKoontz61.htm>
- Larry, Roy, (2012). *Jurus Kilat Mahir Visual Basic*, Jakarta : Dunia Komputer Liskayani, dkk, (2019). Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Dasarnegeri Di Kecamatan Air Kumbang Berdasarkan Beban Kerja Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara (JPDN)*. Vol 5(1)
- Mahmudi. 2011 *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta UII Press.
- Maisyarah, (2017). Pengaruh Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Jurnal Riset Ilmiah Akuntansi* . Vol 6(2)
- Malik dan Nurfauzi (2011). Model sistem informasi pengelolaan dan laporan keuangan dana BOS Berbasis Multi User *Jurnal STEKOM* Vol 1(1)

- Nadira, (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri Jumapolo. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol 5(6).
- Nasution dkk, (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berbasis Web di SMPN 2 Satu Kalimantan Selatan. *REPOSITOR Jurna* . Vol 2 (1)
- Noor, T.R dan Monita, E, (2021). Efisiensi Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamik Manajemen Pendidikan (JDMP)*. Vol 6(1)
- Oxford Online Language, (2021). Defenition of Online. <https://www.lang.ox.ac.uk/>
- Peprizal dan Syah, (2020). Pengembangan Media Pembelajaran erbasis Web Pada Mata Pelajaran Instalasi Penerangan Listri . *Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran* Vol 4(3)
- Permendikbud, (2012). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_44_12.pdf
- _____, (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

- Permendiknas, (2009). Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia
- PP, (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular. (Online) (<https://jdih.kemdikbud.go.id>).
- Pusvitasari dkk, (2020). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Studi kasus di SD Muhammadiyah Krian, Sidoarjo), *Jurna Manajemen Pendidikan Islam*. Vol 4 (1)
- Rabuisa dkk, (2018). Kinerja Perusahaan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Raya Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol 13(2)
- Rahardja *et al* (2018). Implementation of Online Accounting Software As Supporting Of Financial Statemen , *Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA* . VOL 8(2)
- Rahmat, H dkk, (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol 7 (2)
- Rangongo *et al.*, (2016). Causes of Financial Mismanagement in South African vublic Schools The Views of Role Player . *South African Journal of Education*, 36(3), 1–10.
- Riswan dan Kusuma, (2014). Analisis Laporan

- Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor *Jurna Akuntansi dan Keuangan* Vol 5(1)
- Ria (2018). Analisis Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android Pada Laporan Keuangan UMKM Mekarsari, Depok. *Jurnal Sosio E-Kons.* Vol 10(3)
- Riduwan dan Akdon, (2010). Rumus dan Data dalam Analisis Statistika. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, V., Fauzi, A., Basri, M, (2005). Performance Appraisa . Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Said, A. (2018). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Melestarikan Budaya Mutu Sekola . *Evaluasi*, 2(1)
- Santoso dk , (2014). Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi Absensi Mahasiswa Menggunakan Smart Card Guna Pengembangan Kampus Cerdas (Studi Kasus Politeknik Negeri Tanah Laut). *Jurna Integrasi.* Vol 9(1)
- Santoso, Singgih, (2012). Analisis SPSS pada Statistik Parametri . Jakarta: PT. Elex Media Kumputindo
- Sapitr Nur, (2020). Sumber dan Pengeluaran Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/339433187>
- Sartono, (2001). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikas , Edisi Empat, BPFE; Yogyakarta
- Schermerhorn *e al*, (2005). Basic Organizational Behavior . *Whiley and Sons.*
- https://www.researchgate.net/publication/200047863_Basic_Organizational_Behavior
- Siagian Sondang (2015). Siagian, Sondang P 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Sugiyono, (2016). etode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta
- Suhardan Dadang dkk, (2014). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung Alfabeta
- Sulitroyani, (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Sekolah Di Sd Negeri Se-Kecamatan Way Tub . *Jurnal Pendidikan Akuntansi* Vol 2 (2)
- Sunardi (2017). Efektivitas Penggunaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Kristen Immanuel Kota Pontianak Program Keahlian Akuntansi Dengan Model Evaluasi Cipp (Context, Input, Process, Product). *Jurnal Mahasiswa Magister Akuntans* . Vol 2 (4)
- Sutarman, (2007). Membangun Aplikasi Web Dengan PHP dan MySQL. GRAHA ILM. Yogyakarta
- Ulbert, (2002). Studi Tentang Ilmu Administras , Bandung : Sinar Baru
- Algesindo Uwe , S & Rusdiana, H A., (2017). Sistem Pemikiran Manajemen Alternatif Memecahkan Masalah Pendidika . Bandun : V Pustaka Setia
- Wahjosumidjo. (2002). Kepemimpinan Kepala sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahanny . Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Webster Dictionary, (2021). Defenition offline <https://www.merriam-webster.com/dictionary/off-line>
- _____, (2021). Defentionvo odel. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/model?src=search-dict-hed>

Wibowo, (2013). Perilaku dalam Organisas . akarta: PT. Raja Grafindo

Persada Widayatim, (2018). Implementasi SWOT Strategi Pemasaran Online dan

Offlin e

Pada PT Roti Nusantara Prima Cabang Jatiasi , Bekasi . *Jurnal Sekretari danManajemen* (online) Vol 2(2).

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/view/4264>

Your Dictionary, (2021). Defenition o Online.

<https://www.yourdictionary.com/>

Yuhefizar (2008). 10 jam Mengenal Internet Teknologi dan Aplikasinya.

Penerbit PT Elex Media Komputind : Jakarta.

